

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA  
Periode : Tahun 2021



## Daftar Isi

I. Pendahuluan .....	1
II. Laporan Penilaian sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora tahun 2021 .....	1
III. Struktur Konglomerasi Keuangan .....	3
IV. Struktur Kepengurusan Pada Entitas Utama.....	5
V. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi .....	8
VI. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KK Mega Corpora.....	19
VII. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi .....	24
VIII. Satuan Kerja Audit Terintegrasi.....	31
IX. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi .....	34
X. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi .....	37
XI. Transaksi Intra Group .....	38

### Lampiran

Lampiran 1 .....	41
Lampiran 2 .....	43
Lampiran 3 .....	48
Lampiran 4 .....	56
Lampiran 5 .....	60
Lampiran 6 .....	68

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA TAHUN 2021

### I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dimana Entitas Utama (EU) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan untuk setiap posisi akhir tahun buku.

Laporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang dilakukan Entitas Utama, melalui Unit Kerja Kepatuhan Terintegrasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada EU dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan (KK) Mega Corpora. KK Mega Corpora telah ditetapkan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No.005/RIMG-SKOJK/15 tanggal 10 Maret 2015 perihal Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora. Pada tahun 2021 terjadi perubahan/penambahan anggota KK Mega Corpora, yakni PT. Allo Bank Indonesia, Tbk (d/h PT. Bank Harda Internasional, Tbk), dan perubahan tersebut telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.079/DIRBM-MIRG/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan Grup Mega Corpora.

Hubungan antara EU dan seluruh LJK terelasi dalam KK Mega Corpora adalah Perusahaan Terelasi (*Sister Company*) dimana masing-masing LJK terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama yaitu PT. Mega Corpora.

### II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN MEGA CORPORA TAHUN 2021

Bank Mega sebagai EU telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) KK Mega Corpora (berikut Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega selama Semester I dan semester II tahun 2021) dan telah disampaikan kepada OJK melalui :

- Surat No.022/DIR-CHC/21 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester I tahun 2021 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega (dikirim melalui SiPena 12 Agustus 2021).
- Surat No.008/DIR-CHC/22 tanggal 11 Februari 2022 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahun 2021 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega (dikirim melalui SiPena tanggal 14 Februari 2022).

Hasil penilaian pelaksanaan TKT untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Entitas Utama : PT Bank Mega, Tbk  
Posisi Laporan : Semester I tahun 2021

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama.

Posisi Laporan : Semester II tahun 2021

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama.

Hasil penilaian sendiri Tata Kelola EU dan masing-masing LJK Terelasi posisi 31 Desember 2021 adalah sbb :

No.	LJK dalam KK Mega Corpora	Penilaian Tata Kelola	
		Self Assessment	OJK
1	PT. Bank Mega, Tbk	2	2
2	PT. Allo Bank Indonesia, Tbk	2	Tidak ada
3	PT. Bank Mega Syariah	2	Tidak ada
4	PT. Asuransi Umum Mega	2	Tidak ada
5	PT. PFI Megalife	2	Tidak ada
6	PT. Mega Finance	1	Tidak ada
7	PT. Mega Auto Finance	1	Tidak ada
8	PT. Mega Central Finance	1	Tidak ada
9	PT. Mega Capital Sekuritas	2	Tidak ada
10	PT. Mega Capital Investama	2	Tidak ada
11	PT. Mega Asset Manajemen	2	Tidak ada

2  
JPA

### III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Konglomerasi Keuangan (KK) Mega Corpora seperti ditunjukkan pada bagan berikut terlihat bahwa struktur KK bersifat Horizontal. Seluruh LJK dalam KK Mega Corpora merupakan *sister company* (perusahaan terelasi) dimana LJK-LJK tersebut terpisah secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sama. Penunjukan Bank Mega sebagai Entitas Utama pada KK, telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor.S-47/PB.313/2015 tanggal 15 April 2015.

Sampai dengan saat ini, KK Mega Corpora telah beberapa kali mengalami perubahan nama beberapa anggota KK Mega Corpora dan penambahan anggota KK Mega Corpora sbb :

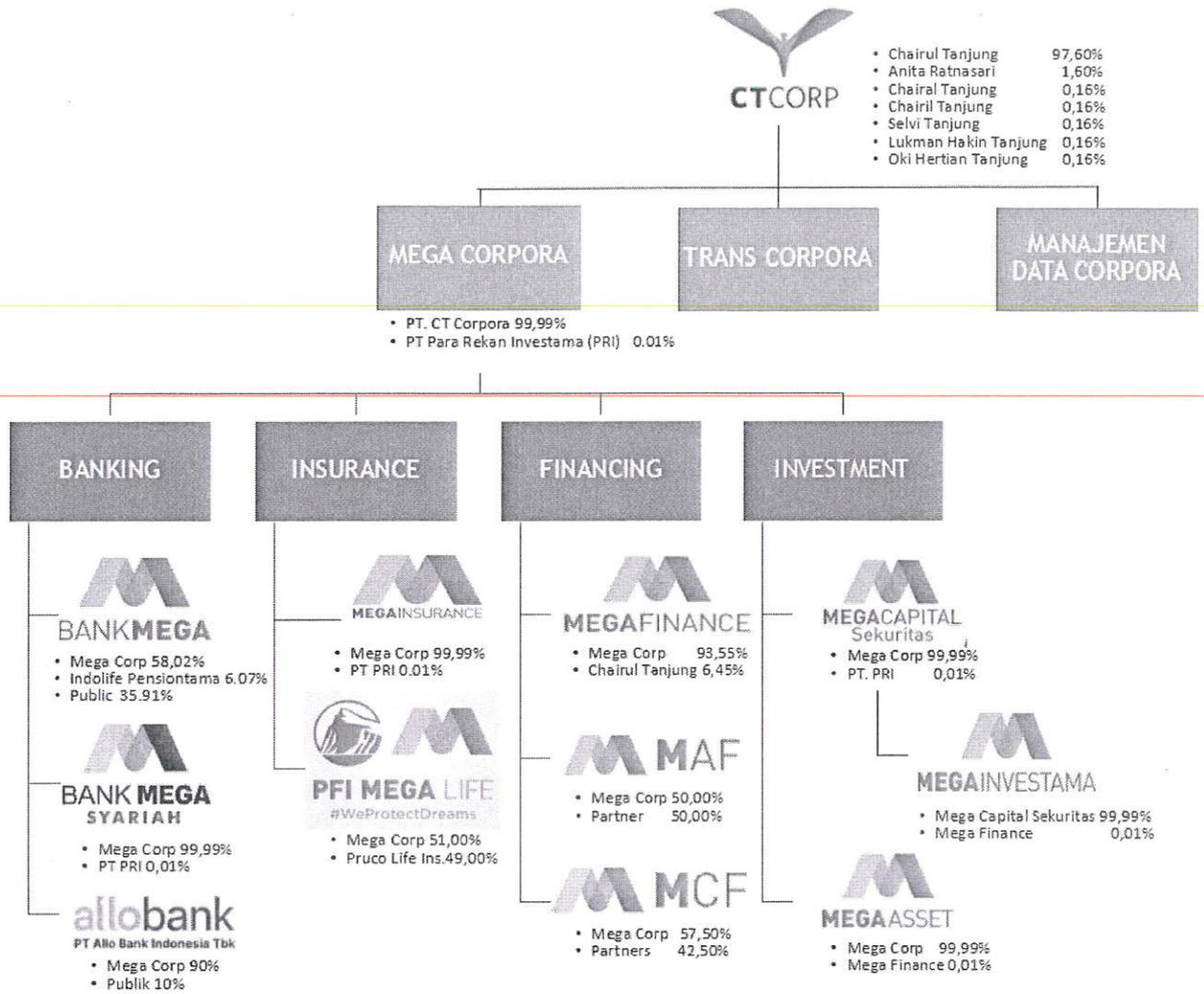
- Perubahan nama salah satu anggota KK Mega Corpora (PT. Mega Capital Sekuritas) telah dilaporkan melalui Surat No.170/DIRBM-MIRG/17 tanggal 9 Juni 2017 Perihal Informasi Perubahan Nama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- Perubahan nama salah satu anggota KK Mega Corpora (PT. PFI Mega Life), telah dilaporkan melalui Surat No.021/DIRRSK/18 tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Informasi Perubahan Nama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- Pada semester I - 2021 anggota KK Mega Corpora bertambah 1 LJK Terelasi di sektor Perbankan yaitu PT. Allo Bank Indonesia, Tbk. (d/h PT. Bank Harda Internasional, Tbk). Penambahan anggota KK Mega Corpora ini telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.079/DIRBM-MIRG/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan Grup Mega Corpora. Atas perubahan ini telah dicatat dan diadministrasikan oleh OJK melalui surat OJK No.S-66/PB.31/2021 tanggal 18 April 2021.
- Perubahan nama salah satu anggota KK Mega Corpora (PT. Allo Bank Indonesia, Tbk), telah dilaporkan melalui Surat No.183/DIRBM-MIRG/2021 tanggal 5 Juli 2021 perihal Perubahan Nama Salah Satu Anggota KK Mega Corpora serta telah dicatat dan diadministrasikan oleh OJK melalui surat OJK No.S-146/PB.31/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Per posisi tanggal 31 Desember 2021, KK Mega Corpora terdiri dari 11 perusahaan dalam sektor Perbankan (Bank Umum dan Bank Umum Syariah), Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Efek.

Struktur keanggotaan KK Mega Corpora adalah sebagai berikut :

Kelompok Bank	Kelompok Perusahaan Asuransi
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT. Bank Mega, Tbk (EU)</li> <li>▪ PT. Bank Mega Syariah</li> <li>▪ PT. Allo Bank Indonesia, Tbk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT. PFI Mega Life</li> <li>▪ PT. Asuransi Umum Mega</li> </ul>
Kelompok Perusahaan Pembiayaan	Kelompok Perusahaan Efek
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT. Mega Central Finance</li> <li>▪ PT. Mega Auto Finance</li> <li>▪ PT. Mega Finance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT. Mega Aset Management</li> <li>▪ PT. Mega Capital Investama</li> <li>▪ PT. Mega Capital Sekuritas</li> </ul>

Struktur kepemilikan saham pada KK Mega Corpora adalah sebagai berikut :



*[Handwritten signature]*

#### IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA

Pada KK Mega Corpora, telah ditunjuk PT. Bank Mega Tbk. sebagai Entitas Utama (EU) dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT), Audit Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT). Untuk mendukung pelaksanaannya, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Mega, Tbk memiliki struktur kepengurusan yang kompeten dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh regulator. Dewan Komisaris dan Direksi telah diangkat melalui RUPS dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

##### Struktur dan komposisi Dewan Komisaris EU :

No.	Dewan Komisaris	RUPST/LB	Tanggal Efektif	Rangkap Jabatan
1	Chairul Tanjung (Komisaris Utama)	15 November 2017	4 Juni 2018	Komisaris Utama pada perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>● PT. CT Corpora</li> <li>● PT. Rekan Investama</li> <li>● PT. Mega Corpora</li> <li>● PT. Trans Corpora</li> <li>● PT. Private Investment Indonesia</li> <li>● PT. Trans Airways</li> <li>● PT. Rekan Investama Indonesia</li> </ul>
2	Yungky Setiawan (Wakil Komisaris Utama)	28 Februari 2018	28 Februari 2018	Komisaris Utama pada perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>● PT. Trans Retail Indonesia</li> <li>● PT. Trans Fashion Indonesia</li> <li>● PT. Trans Food Oriental</li> <li>● PT. Trans Retail</li> <li>● PT. Trans Rasa Nippon</li> <li>● PT. Trans Rasa Oriental</li> <li>● PT. Alfa Retailindo</li> <li>● PT. Trans Rasa Bali</li> <li>● PT. Trans Pizza Resto</li> <li>● PT. Metro Outlet Indonesia</li> </ul> Komisaris pada perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>● PT. Metropolitan Retailmart</li> <li>● PT. Sistem Pembayaran Digital</li> <li>● PT. Trans Ice</li> </ul>
3	Achjadi Ranuwisastra (Komisaris Independen)	24 Maret 2006	24 Maret 2006	Ketua Komite pada PT. Bank Mega, Tbk : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Komite Audit</li> <li>● Komite Remunerasi &amp; Nominasi</li> <li>● Komite Tata Kelola Terintegrasi</li> </ul>
4	Lambock V Nahattands (Komisaris Independen)	7 Mei 2015	18 Desember 2015	Staff Khusus Menko Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
5	Aviliani (Komisaris Independen)	28 Februari 2018	4 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketua Komite Pemantau Risiko pada PT. Bank Mega, Tbk.</li> <li>● Komisaris Independen pada PT. Lintas Artha (perusahaan bukan Lembaga Keuangan diluar group usaha)</li> <li>● Dosen, Perbanas Institute Jakarta</li> </ul>

No.	Dewan Komisaris	RUPST/LB	Tanggal Efektif	Rangkap Jabatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi Perbankan (Research, Publikasi, R&amp;D Perbanas)</li> </ul>

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris EU sesuai dengan kegiatan usaha EU, serta telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Rangkap jabatan Chairul Tanjung dan Yungky Setiawan dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari Pemegang Saham Pengendali (*ultimate shareholders*), sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Rangkap jabatan Komisaris Independen atas nama Lambock V Nahattands dan Aviliani juga sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

#### Struktur dan komposisi Direksi EU :

Nama	Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif
Kostaman Thayib	Direktur Utama	17 April 2013	16 Juli 2013
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	27 Maret 2014	22 September 2014
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC	29 Maret 2012	29 Agustus 2012
Indivara Erni	Direktur Risk	27 Maret 2014	22 September 2014
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	17 April 2013	16 Juli 2013
Lay Diza Larentie	Direktur Consumer Banking	7 Mei 2015	30 Desember 2015
C. Guntur Triyudianto	Direktur Operations & IT	28 Februari 2018	12 September 2018

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha EU, serta telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Seluruh anggota Direksi EU tidak memiliki rangkap jabatan.

Direktur Utama EU telah menunjuk Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang menjalankan pelaksanaan dan pemantauan TKT pada KK Mega Corpora, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.174/DIRBM/16 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & TKT Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

Terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah ditunjuk unit kerja Market, Liquidity, & Integrated Risk Management (MIRG) sebagai Satuan kerja Manajemen

Risiko Terintegrasi (SKMRT) sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. 100/DIRBM/16 tanggal 30 Maret 2016 dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. 057/DIRBM/21 tanggal 20 September 2021 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

## V. STRUKTUR KEPENGURUSAN LJK TERELASI

Struktur Kepengurusan pada masing-masing LJK Terelasi sebagian besar telah memenuhi ketentuan Tata Kelola pada setiap sektor baik dalam jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi. Berikut struktur kepengurusan masing-masing LJK Terelasi :

### A. Struktur Kepengurusan PT. Bank Mega Syariah

Struktur kepengurusan PT. Bank Mega Syariah (Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah) ditetapkan dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama / Komisaris Independen)	6 April 2021	15 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dosen pada Institut Teknologi Sepuluh November- Surabaya</li> <li>▪ Ketua Badan Wakaf Indonesia</li> <li>▪ Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya</li> <li>▪ Ketua Dewan Pers</li> </ul>
2	Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	6 April 2021	15 Oktober 2015	Tidak ada
3	Prof. DR Nasaruddin Umar, MA (Komisaris Independen)	6 April 2021	08September 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris Independen PT Semen Indonesia</li> <li>▪ Imam Besar Mesjid Istiqlal</li> </ul>

#### Direksi

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Yuwono Waluyo (Direktur Utama)	6 April 2021	19 Desember 2019	Tidak ada
2	Marjana (Direktur Kepatuhan)	6 April 2021	25 Oktober 2013	Tidak ada
3	Slamet Riyadi (Direktur)	6 April 2021	30 September 2020	Tidak ada

### Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK/Rekomendasi MUI	Rangkap Jabatan
1	DR. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag (Ketua)	27 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat OJK No.SR-11/PB.1/2020 tanggal 15 Juli 2020</li> <li>▪ Surat DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/1/2019 tanggal 15 Januari 2020</li> </ul>	Dewan Pengawas Syariah : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT. Asuransi Takaful</li> <li>▪ PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk</li> <li>▪ PT. Fintek Karya Nusantara</li> </ul>
2	Prof. DR.H.A. Satori Ismail (Anggota)	27 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003</li> <li>▪ Pengangkatan sudah dilakukan sebelum adanya ketentuan tentang PKK dari OJK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DPS PT. Asuransi KBRU (Kali Besar Raya Utama)</li> <li>▪ DPS PT. Asuransi Asoka Mas</li> </ul>

Jumlah dan komposisi Direksi, Dekom serta DPS pada PT. Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan.

Terdapat rangkap jabatan dua orang Komisaris, namun rangkap jabatan tersebut masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- Prof.DR.Ir.H Mohammad Nuh, DEA sebagai Dosen ITS, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, dan Ketua Dewan Pers.
- Prof.DR. Nasaruddin Umar, MA sebagai Komisaris Independen pada PT. Semen Indonesia, Persero dan Imam Besar Mesjid Istiqlal.

Terdapat rangkap jabatan anggota DPS pada Bank atau perusahaan lain, namun tidak melebihi ketentuan maksimal (pada 4 bank atau perusahaan lain).

### B. Struktur Kepengurusan PT. Allo Bank Indonesia, Tbk.

#### Dewan Komisaris

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Ali Gunawan (Komisaris)	7 Mei 2021	13 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris Utama PT Asuransi Umum Mega</li> <li>▪ Komisaris Utama PT. Mega Central Finance</li> <li>▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama</li> <li>▪ Sebagai pengurus pada 38 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora.</li> </ul>

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
2	R. Soedaryatmo Yosowidagdo (Komisaris Independen)	7 Mei 2021	28 Agustus 2007	Tidak ada

### Direksi

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Ari Yanuanto Asah (Direktur Operasional & IT / Plt Direktur Utama)	07 Mei 2021	6 April 2021	Tidak ada
2	Arief Tendeas (Direktur Bisnis)	07 Mei 2021	6 April 2021	Tidak ada
3	Ganda Raharja Rusli (Direktur Risk& Compliance)	18 Oktober 2021	14 Desember 2021	Tidak ada

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Allo Bank Indonesia, Tbk belum sesuai dengan ketentuan, yakni :

- Belum terdapat Direktur Utama definitif.
- Belum terdapat Komisaris Utama dan jumlah Komisaris terdiri dari 2 orang.

### C. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Asuransi

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. PFI Mega Life dan PT. Asuransi Umum Mega secara umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.73/POJK.5/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan perasuransian secara umum telah sesuai dengan ketentuan. Namun bulan Agustus 2021, salah satu Komisaris Independen pada PT. Asuransi Umum Mega, yakni Nisfu Chasbullah meninggal dunia dan sampai dengan Desember 2021 masih belum ada penggantinya. Posisi pengganti Komisaris Independen tersebut akan dipenuhi pada tahun 2022.

Terdapat rangkap jabatan anggota DPS pada PT. PFI Mega Life (DR. H. Amirsyah Tambunan), namun rangkap jabatan tersebut tidak melebihi ketentuan maksimal (pada 4 Lembaga Jasa Keuangan lainnya) rangkap jabatan anggota DPS.

Berikut adalah susunan Kepengurusan Perusahaan Asuransi pada KK Mega Corpora :

## 1. PT. PFI Mega Life

### Dewan Komisaris

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Farmawaty (Komisaris Utama)	24 September 2018	30 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris PT. Mega Central Finance</li> <li>▪ Komisaris PT. Mega Auto Finance</li> <li>▪ Komisaris PT Trans Properti Manajemen</li> <li>▪ Pejabat Eksekutif PT Bank Mega, Tbk</li> </ul>
2	Pavan Dhamija (Komisaris)	20 April 2021	15 April 2021	Tidak ada
3	Ratna Januarita (Komisaris Independen)	3 Juli 2017	23 Juli 2012	Tidak ada
4	Firdaus Djaelani (Komisaris Independen)	9 Februari 2021	28 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris Independen PT Tugu Reasuransi Indonesia</li> <li>▪ Komisaris Independen PT. Asuransi MAG</li> </ul>

### Direksi

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Samdarshi Sumit (Direktur Utama)	22 Agustus 2019	9 Juli 2019	Tidak ada
2	Meilani Setiawan (Direktur)	5 November 2021	8 Oktober 2018	Tidak ada
3	Hani Kusumawardani (Direktur Kepatuhan)	27 Mei 2019	25 April 2019	Tidak ada

### Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK/Rekomendasi MUI	Rangkap Jabatan
1	DR. H. Amirsyah Tambunan, MA (Ketua)	27 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KEP-44/NB.22/2016, tanggal 27 Juni 2016</li> <li>▪ DSN MUI No.U-090/DSN-MUI/II/2016, tanggal 17 Februari 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DPS PT. Fasham Finance</li> <li>▪ DPS PT. MCF</li> <li>▪ DPS PT. Maybank</li> </ul>
2	H. Azrul Tanjung, SE, M.Si. (Anggota)	27 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KEP-8/NB.22/2016, tanggal 4 Agustus 2016</li> <li>▪ DSN MUI No.U-090/DSN-MUI/II/2016, tanggal 17 Februari 2016</li> </ul>	Tidak ada

## 2. Asuransi Umum Mega

### Dewan Komisaris

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Ali Gunawan (Komisaris Utama)	21 Juni 2021	26 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris PT Allo Bank Indonesia Tbk</li> <li>▪ Komisaris Utama PT. Mega Central Finance</li> <li>▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama</li> <li>▪ Sebagai pengurus pada 38 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora.</li> </ul>
2	Djazoeli Sadhani (Komisaris Independen)	21 Juni 2021	7 Mei 2012	Tidak ada
3	Nisfu Chasbullah*) (Komisaris Independen)	21 Juni 2021	5 Mei 2015	Tidak ada

\*) meninggal dunia tanggal 2 Agustus 2021

### Direksi

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Lukman Siregar (Direktur)	7 Juni 2021	18 Oktober 2010	Tidak ada
2	Tomy Ferdiansyah (Direktur)	7 Juni 2021	20 Mei 2020	Tidak ada
3	Agustina (Direktur)	7 Juni 2021	29 Juni 2020	Tidak ada
4	Hardianto Wirawan (Direktur)	7 Juni 2021	10 Juni 2020	Tidak ada

### Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK / Rekomendasi MUI	Rangkap Jabatan
1	Kenny Hidayah (anggota)	7 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Rekomendasi DSN MUI No. U-073/DSN-MUI/IV/2006 tanggal 4 April 2006</li> <li>▪ Pengangkatan sudah dilakukan sebelum adanya ketentuan tentang PKK dari OJK.</li> </ul>	Tidak ada

#### D. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Pembiayaan

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Finance (PT. MF), PT. Mega Auto Finance (PT. MAF), PT. Mega Central Finance (PT. MCF) secara umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Masih terdapat rangkap jabatan Komisaris Independen atas nama Ngalim Sawego pada LJK PT. MAF dan PT. MCF. Namun demikian Ngalim Sawego telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dari OJK untuk jabatan sebagai Komisaris Independen melalui Surat OJK :

- Surat OJK No.KEP-582/NB.11/2019 tanggal 7 Oktober 2019 (untuk PT. MAF).
- Surat OJK No.KEP-1018/NB.11/2018 tanggal 9 November 2018 (untuk PT. MCF).

Pada semester I - 2022 akan dilakukan penggantian Komisaris Independen pada PT. MAF sehingga tidak terdapat lagi rangkap jabatan Komisaris Independen PT. MCF dan PT. MAF.

Terdapat rangkap jabatan anggota Dekom PT. MF, PT. MCF dan PT. MAF sebagai pengurus pada beberapa perusahaan dalam group usaha, yakni Ali Gunawan dan Zainal Rahman. Namun hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan karena rangkap jabatan dimaksud dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam grup usaha sesuai surat penugasan sebagai wakil pemegang saham dari Pemegang Saham Pengendali. Sedangkan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya juga telah sesuai dengan ketentuan.

Terdapat Rangkap jabatan anggota DPS pada PT. MCF (KH. Muhyidin Junaidi dan DR. H. Amirsyah Tambunan), namun tidak melebihi ketentuan maksimal (pada 4 Lembaga Jasa Keuangan syariah lainnya).

Berikut ini adalah susunan Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora :

##### 1. PT. Mega Finance

###### Dewan Komisaris

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Wiwi Kurnia (Komisaris Utama)	28 September 2020	20 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur CT Corpora</li> <li>▪ Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance</li> </ul>
2	Zainal Rachman (Komisaris)	28 September 2020	15 September 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris PT. Mega Capital Sekuritas</li> <li>▪ Sebagai pengurus pada 47 Perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora.</li> </ul>
3	Togar Sinaga (Komisaris Independen)	5 November 2021	22 Desember 2021	Tidak ada

### Direksi

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Iwan Setiawan (Direktur Utama)	28 September 2020	20 Desember 2012	Tidak ada
2	Hermawan Ariyanto (Direktur)	28 September 2020	9 Juli 2013	Tidak ada
3	Betty Herawati (Direktur)	15 Desember 2020	19 Januari 2021	Tidak ada

### Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK / Rekomendasi MUI	Rangkap Jabatan
1	Drs Zafrullah Salim	28 September 2020	KEP No.KEP-818/NB.1/2014 tanggal 29 April 2014	Tidak ada
2	DR. Sopa M.Ag	28 September 2020	KEP No.KEP-60/NB.22/2020 tanggal 10 Agustus 2020	Tidak ada

## 2. PT. Mega Auto Finance

### Dewan Komisaris

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Wiwi Kurnia (Komisaris Utama)	24 Desember 2021	16 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris Utama PT Mega Finance</li> <li>▪ Direktur CT Corpora</li> </ul>
2	Farmawaty (Komisaris)	24 Desember 2021	14 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris Utama PT PFI Megalife</li> <li>▪ Komisaris PT Mega Central Finance</li> <li>▪ Komisaris PT Trans Property Manajemen</li> <li>▪ Pejabat Eksekutif PT Bank Mega, Tbk</li> </ul>
3	Yasuaki Yoshino (Komisaris)	24 Desember 2021	18 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur PT Mega Central Finance</li> </ul>
4	Ngalim Sawego (Komisaris Independen)	24 Desember 2021	7 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris Independen PT Mega Central Finance</li> <li>▪ Komisaris Independen PT Indosurya Inti Finance</li> </ul>

### Direksi

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Melly Armelia (Direktur Utama)	24 Desember 2021	8 Februari 2021	Tidak ada
2	Sunardi (Direktur)	24 Desember 2021	20 Desember 2012	Tidak ada
3	Asikin (Direktur)	24 Desember 2021	2 Oktober 2019	Tidak ada

### 3. PT. Mega Central Finance

#### Dewan Komisaris

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Ali Gunawan (Komisaris Utama)	31 Mei 2021	26 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris PT Allo Bank Indonesia Tbk</li> <li>▪ Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega</li> <li>▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama</li> <li>▪ Sebagai pengurus pada 38 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora.</li> </ul>
2	Farmawaty (Komisaris)	31 Mei 2021	28 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris Utama PT PFI Megalife</li> <li>▪ Komisaris PT. Mega Auto Finance</li> <li>▪ Komisaris PT Trans Properti Manajemen</li> <li>▪ Pejabat Eksekutif PT Bank Mega</li> </ul>
3	Masamichi Takeda (Komisaris)	31 Mei 2021	19 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris PT Surya Artha Nusantara Finance</li> <li>▪ Wakil Presiden Direktur PT. Marubeni Indonesia</li> <li>▪ Direktur PT. Trans Oto Internasional</li> <li>▪ Direktur PT Surya Cakra Anugerah Nusantara</li> </ul>
4	Ngalim Sawego (Komisaris Independen)	31 Mei 2021	9 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris Independen PT. Mega Auto Finance</li> <li>▪ Komisaris Independen PT Indosurya Inti Finance</li> </ul>

#### Direksi

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Rudy Santoso (Direktur Utama)	27 Desember 2021	28 September 2021	Tidak ada
2	Linawaty (Direktur)	27 Desember 2021	27 Desember 2021	Tidak ada
3	Yasuaki Yoshino (Direktur)	27 Desember 2021	19 Juli 2019	Komisaris PT Mega Auto Finance

### Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK / Rekomendasi MUI	Rangkap Jabatan
1	KH Muhyiddin Junaidi (Ketua)	15 September 2020	10 Juni 2014	▪ DPS PT. Asuransi Takaful Keluarga
2	DR.H.Amirsyah Tambunan (Anggota)	15 September 2020	10 Juni 2014	▪ DPS PT. PFI Mega Life ▪ DPS PT. Fasham Finance ▪ DPS PT. Maybank
3	Drs.H.A Chunaeni Saleh (Anggota)	15 September 2020	8 April 2014	Tidak ada

### E. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Capital Sekuritas (PT. MCS), PT. Mega Asset Management (PT. MAM) dan PT. Mega Capital Investama (PT. MCINV) telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur dalam POJK No.57/POJK.04/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek & Perantara Pedagang Efek dan POJK No.10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Terdapat rangkap jabatan Komisaris Non Independen pada perusahaan lain dalam satu group usaha, namun masih sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku dan didukung dengan surat penugasan sebagai wakil pemegang saham dari Pemegang Saham Pengendali.

Susunan Kepengurusan Perusahaan Efek pada KK Mega Corpora adalah sebagai berikut :

#### 1. PT. Mega Capital Sekuritas

##### Dewan Komisaris

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Agus Muhammad (Komisaris Utama / Komisaris Independen)	27 Desember 2018	21 November 2018	Tidak ada
2	Zainal Rahman (Komisaris)	27 Desember 2018	25 Agustus 2011	▪ Komisaris PT. Mega Finance ▪ Sebagai pengurus pada 47 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora

## Direksi

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Yimmy Lesmana (Direktur Utama)	15 September 2015	24 Agustus 2015	Tidak ada
2	Nany Susilowati (Direktur)	15 September 2015	15 Juli 2010	Tidak ada

## 2. PT. Mega Capital Investama

### Dewan Komisaris

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Ali Gunawan (Komisaris Utama)	13 September 2019	6 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisaris PT Allo Bank Indonesia Tbk</li> <li>▪ Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega</li> <li>▪ Komisaris Utama PT. Mega Central Finance</li> <li>▪ Sebagai pengurus pada 38 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora.</li> </ul>
2	Johanes Bambang Kendaro (Komisaris Independen)	13 September 2019	7 Oktober 2019	Tidak ada

## Direksi

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Finny Fauzana (Direktur)	13 September 2019	23 Februari 2017	Tidak ada
2	Rini Subarningsih (Direktur)	13 September 2019	6 Mei 2011	Tidak ada

## 3. PT. Mega Asset Manajemen

### Dewan Komisaris

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Chairal Tanjung (Komisaris Utama)	4 Maret 2021	20 Oktober 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagai pengurus pada 45 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora.</li> </ul>
2	Sakli Anggoro (Komisaris Independen)	4 Maret 2021	5 September 2019	Tidak ada

### Direksi

No.	Nama / Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif / PKK	Rangkap Jabatan
1	Martono (Direktur Utama)	24 Agustus 2021	14 Juli 2021	Tidak ada
2	Suryani Salim (Direktur)	24 Agustus 2021	28 September 2017	Tidak ada

### Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama / Jabatan	Tanggal Penunjukan	Tanggal Efektif / Rekomendasi MUI	Rangkap Jabatan
1	Arwani (Ketua)	25 Januari 2018	Rekomendasi DSN - MUI No.U-064/DSN- MUI/I/ 2018, tanggal 24 Januari 2018	Tidak ada
2	Abdul Wasik, M.Si (Anggota)		Rekomendasi DSN - MUI No.164/DSN- MUI/III/ 2016, tanggal 23 Maret 2016	Tidak ada

## VI. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KK MEGA CORPORA

### A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama (EU)

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan TKT, pada tahun 2021 Dewan Komisaris EU telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Melakukan pengkinian dan penyempurnaan terhadap :
  - Komite TKT berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/VIII/21 Tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - Pedoman Kerja Komite TKT berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 003 /DEKOM/VIII/21 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi .
2. Dewan Komisaris EU telah melakukan pengawasan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat KTKT seperti pembahasan penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Audit Terintegrasi, pembahasan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Dewan Komisaris EU telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2021 dan 2 (dua) kali rapat diantaranya membahas tentang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Data Rapat Dewan Komisaris dengan Pembahasan tentang Tata Kelola Terintegrasi :

No	Tanggal Rapat	Agenda	Notulen Rapat
1.	5 Mei 2021	4 agenda (1 agenda diantaranya tentang Pelaksanaan TKT KK Mega Corpora)	NT.003/DEKOM/21 tanggal 5 Mei 2021
2.	16/08/2021	3 agenda (1 agenda diantaranya adalah Pelaksanaan TKT KK Mega Corpora)	NT.004/DEKOM/21 tanggal 16 Agustus 2021

4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KK Mega Corpora.

No	Nomor MD	Tanggal MD	Perihal
1.	No.009/KOMISARIS/21	05 Maret 2021	Pelaksanaan TKT Group Usaha Mega Corpora.
2.	No.019/KOMISARIS/21	16 Agustus 2021	Pelaksanaan TKT Group Usaha Mega Corpora.

## B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama

Untuk memastikan penerapan TKT, pada tahun 2021 Direksi EU telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada semester I - 2021 anggota KK Mega Corpora bertambah 1 LJK Terelasi di sektor Perbankan yaitu PT. Allo Bank Indonesia, Tbk. (d/h PT. Bank Harda Internasional, Tbk), atas perubahan keanggotaan tersebut telah dilaporkan kepada OJK.
2. Menindaklanjuti MD Komisaris dengan mengeluarkan surat kepada LJK Terelasi :

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal
1.	No.008/DIR-CHC/21	25 Maret 2021	Rekomendasi Dekom EU Terkait TKT Grup Mega Corpora
2.	No.028/DIR-CHC/21	27 Agustus 2021	Rekomendasi Dekom EU Terkait TKT Grup Mega Corpora.

3. Telah melakukan pengkinian dan penyempurnaan terhadap Pedoman TKT berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega No.SK.051/DIRBM/21 tanggal 7 September 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
4. Pedoman kerja TKT tersebut, berikut pengkinian Komite TKT dan Pedoman Kerja Komite TKT, telah didistribusikan kepada LJK terelasi untuk diimplementasikan melalui surat No.032/DIR-CHC/2020 tanggal 28 September 2021 Perihal Pedoman TKT dan Komite TKT KK Mega Corpora.

## C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

### 1. Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komite TKT)

Komite TKT dibentuk oleh Dewan Komisaris EU melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris EU, dan terakhir dilakukan perubahan / pengkinian melalui SK Dewan Komisaris No.002/DEKOM/VIII/21 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen pada Komite TKT telah mewakili setiap sektor dan sesuai dengan kebutuhan KK Mega Corpora. Susunan Keanggotaan Komite TKT KK Mega Corpora pada tahun 2021 adalah sbb :

NAMA	JABATAN	SEKTOR USAHA
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	Komisaris Independen Entitas Utama
Yuni Lastianto	Sekretaris	Direktur Compliance & HC, Entitas Utama
Rachmat Maulana	Anggota	Komisaris Independen PT. Bank Mega Syariah
Ratna Januarita	Anggota	Komisaris Independen PT. PFI Mega Life
Djazoeli Sadhani	Anggota	Komisaris Independen PT. Asuransi Umum Mega
Ngalim Sawego	Anggota	Komisaris Independen PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance
Zainal Rahman	Anggota	Komisaris PT. Mega Finance
Agus Muhammad	Anggota	Komisaris Utama & Komisaris Independen PT. Mega Capital Sekuritas
Sakli Anggoro	Anggota	Komisaris Independen PT. Mega Asset Management
JB. Kendarto	Anggota	Komisaris Independen PT. Mega Capital Investama
Adrial Salam	Anggota	Pihak Independen salah satu anggota Komite pada Entitas Utama (PT. Bank Mega, Tbk.)
A Satori Ismail	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah
Ali Gunawan	Anggota	Perwakilan Pemegang Saham Pengendali (PT.Mega Corpora)

## 2. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris EU No.002/DEKOM/VIII/21 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- Memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, termasuk memantau pelaksanaan kerjasama Sinergi Perbankan.
- Melakukan kaji ulang dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Kerja Tata Kelola Terintegrasi.
- Mengadakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

## 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2021, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran	Notulen Rapat
05/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penilaian Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2020</li> <li>▪ Pemantauan Sinergi Bank Mega - Bank Mega Syariah</li> <li>▪ KUB Mega Corpora</li> </ul>	78% (11/14)	NT.001/KOM-TKT/2021
06/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penilaian Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2021.</li> <li>▪ Pemantauan Sinergi Bank Mega - Bank Mega Syariah</li> </ul>	71 % (10/14)	NT.002/KOM-TKT/2021

#### 4. Tindak lanjut hasil rapat dan rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Hasil keputusan rapat Komite TKT telah dituangkan dalam rekomendasi Komite TKT untuk Dewan Komisaris EU, dan telah ditindaklanjuti oleh EU dan LJK Terelasi antara lain :

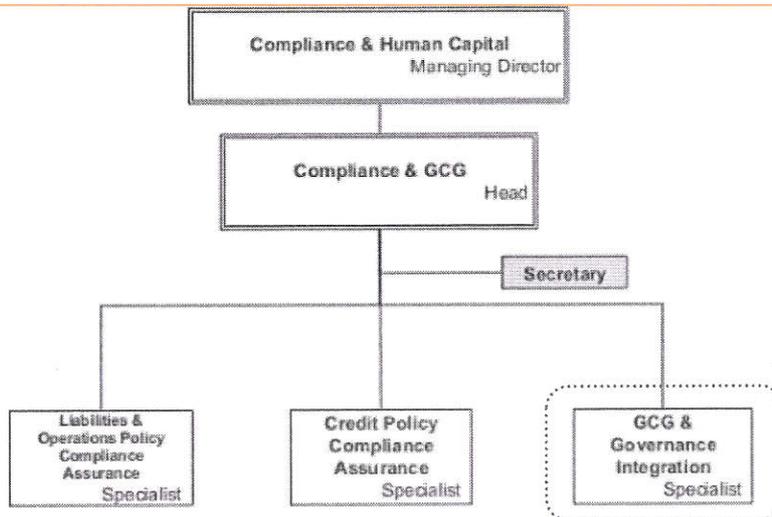
- a) Pengkinian Keanggotaan Komite TKT & Pedoman Komite TKT dengan diterbitkannya SK.No.002 /DEKOM/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi dan SK.003/DEKOM/VIII/21 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- b) Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi EU No.051/DIRBM/21, tanggal 7 September 2021 Perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- c) Telah terbentuknya Komite Pembantu Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi) pada LJK Perusahaan Pembiayaan sesuai POJK No.29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Namun demikian, Komite Pemantau Risiko pada PT. MAF belum dilengkapi dengan keberadaan Pihak Independen, dan hal tersebut akan dipenuhi pada tahun 2022.
- d) Tindak lanjut aspek struktur TKT KK Mega Corpora :
  - Rangkap Jabatan Komisaris Independen Bp. Sutrisno Iwantono (PT. PFI Mega Life) yang merangkap sebagai Komisaris pada PT. Trans Digital (d/h Agranet Multicitra Siberkom) telah diganti oleh Komisaris Independen Bp. Firdaus Djaelani yang telah disetujui oleh OJK dan lulus ujian PKK melalui salinan SK Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-469/NB.11/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan berdasarkan Akta Notaris No.32 tanggal 9 Februari 2021.

- Rangkap jabatan Direktur Utama PT. MCF (Wiwi Kurnia) sebagai Direktur pada PT. CT Corpora telah ditindaklanjuti dengan penunjukan Direktur Utama PT. MCF yang baru, yakni Rudy Santosa berdasarkan Akta Notaris No.44 tanggal 27 Desember 2021. Direktur Utama yang baru tersebut telah disetujui oleh OJK melalui salinan SK Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-660/NB.11/2021 tanggal 28 September 2021.
- Komisaris Independen pada PT. MCF atas nama Adnan Djaelani yang meninggal dunia telah digantikan oleh Togar Sinaga berdasarkan Akta Notaris No.2 tanggal 5 November 2021, dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui salinan SK Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-865/NB.11/2021 tanggal 22 Desember 2021.

## VII. SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

### A. Struktur Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Terintegrasi. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dilakukan oleh Unit Kerja yang telah ada dengan pengembangan pada fungsi / bagian yang berada pada Unit Kerja Compliance & GCG. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi SK.025/DIRBM/21 tanggal 29 Maret 2021 perihal Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega, Tbk. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut :



Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah melaksanakan fungsi sebagai koordinator dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK), seperti :

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Compliance & Human Capital (CHC).
3. Melaksanakan penilaian (*self assessment*) penerapan TKT dan menyusun Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dengan Bank Mega secara berkala setiap semester dan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK.
4. Menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT, dan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK.
5. Mengadakan rapat koordinasi dengan LJK Terelasi dalam KK Mega Corpora untuk memastikan pelaksanaan Tata Kelola di masing-masing LJK telah berjalan dengan baik.

6. Memberikan masukan kepada Komite TKT terhadap permasalahan dan usulan perbaikan penerapan Tata Kelola di masing-masing LJK Terelasi dalam KK Mega Corpora sebagai materi rapat Komite TKT.
7. Menyiapkan laporan aktivitas Tata Kelola dan TKT setiap triwulanan sebagai bagian dari Laporan Kepatuhan Bank Mega yang akan disampaikan kepada Direktur Utama dan semesteran yang akan disampaikan kepada OJK sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

#### B. Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Pada tahun 2021 Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengkinian *job description* dan Pedoman Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang merupakan bagian dari Pedoman Kerja Unit Kerja Compliance & GCG sebagaimana Surat Edaran Direksi No. 123/DIRBM-CGCG/21 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pedoman Kerja Compliance & Good Corporate Governance (CGCG) PT Bank Mega, Tbk.
2. Melakukan koordinasi dalam rangka monitoring pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola pada LJK Terelasi. Selama tahun 2021, EU telah mengadakan Rapat dan sharing knowledge dengan PIC LJK Terelasi KK Mega Corpora sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Laporan Self Assessment Semester I 2021</li> <li>• Struktur KK Mega Corpora</li> <li>• Monitoring Rapat Komisaris, Direksi dan DPS LJK Mega Corpora</li> <li>• Monitoring Pembentukan dan Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> <li>• Sinergi Perbankan Bank Mega dan Bank Mega Syariah</li> </ul>	29-06-2021	PIC LJK Terelasi
2.	Sharing Knowledge Strategi Anti Fraud	29-9-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIC TKT EU</li> <li>• PIC TKT LJK Terelasi</li> <li>• Auditor Internal LJK Terelasi</li> </ul>
3	Sharing Knowledge Pemeriksaan Penerapan SLIK	21-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Audit Terintegrasi EU</li> <li>• Auditor Internal LJK Terelasi</li> <li>• PIC TKT LJK Terelasi</li> </ul>

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Laporan Self Assessment Semester II 2021</li> <li>Struktur Manajemen LJK Terelasi</li> <li>Sinergi Perbankan Bank Mega dan Bank Mega Syariah</li> </ul>	08-12-2021	PIC LJK Terelasi

3. Satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi EU menyusun laporan terkait penerapan TKT pada KK Mega Corpora. Selama tahun 2021 satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan sebagai berikut :

No.	Nama Laporan	Periode Laporan	Nomor dan tanggal Surat
1.	Laporan <i>Self Assesment</i> Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Semester II Tahun 2020 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega	Semester II Tahun 2020	No.005/DIR-CHC/21 tanggal 10 Februari 2021
2.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Tahun Periode 2020	Tahun 2020	No.015/DIR-CHC/21 tanggal 28 Mei 2021
3.	Laporan <i>Self Assesment</i> Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Semester I Tahun 2021 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega	Semester I Tahun 2021	No.022/DIR-CHC/21 tanggal 10 Agustus 2021

4. Melakukan monitoring pelaksanaan kepatuhan & tata kelola pada LJK Terelasi yang berada dalam KK Mega Corpora. Bank Mega sebagai EU telah mengirimkan surat kepada LJK Terelasi terkait dengan aktivitas pemantauan TKT, yakni :
- Surat No.008/DIR-CHC/21, tanggal 25 Maret 2021 Perihal Rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Dewan Komisaris Entitas Utama Terkait Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Mega Corpora.
  - Surat No.028/DIR-CHC/21, tanggal 27 Agustus 2021 Perihal Rekomendasi Dewan Komisaris Entitas Utama Terkait Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Mega Corpora.
  - Surat No.032/DIR-CHC/21, tanggal 28 September 2021 Perihal Pedoman TKT dan Komite TKT KK Mega Corpora

5. Monitoring Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan :

a. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan pada LJK Terelasi

Struktur Fungsi Kepatuhan Bank Mega, Allo Bank Indonesia dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan, dimana telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan.

Pada sektor Perusahaan Asuransi, LJK Terelasi telah memenuhi ketentuan pembentukan Fungsi Kepatuhan. PT. PFI Mega Life telah membentuk Satuan Kerja Compliance & GCG yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan, sedangkan PT. Asuransi Umum Mega telah membentuk Unit Risk Legal & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Enterprise Risk Management (ERM), Legal dan Compliance.

Pada sektor Perusahaan Pembiayaan, LJK Terelasi juga telah memenuhi ketentuan pembentukan Fungsi Kepatuhan. PT. MAF dan PT. MCF telah membentuk Satuan Kerja Legal & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan, sedangkan untuk PT. MF telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan

Pada sektor Perusahaan Efek, PT. Mega Capital Sekuritas (Perusahaan Efek yang merupakan PPE/PEE) telah membentuk Unit Kerja Internal Audit & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sedangkan pada PT. Mega Asset Management (PT. MAM) dan PT. Mega Capital Investama (PT. MCIInv) yang merupakan Perusahaan Efek bidang usaha Manager Investasi, telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Data Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan disampaikan pada lampiran 1.

b. Pembentukan Komite-Komite & Fungsi-Fungsi

Untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai yang dipersyaratkan oleh regulator, maka EU dan LJK Terelasi harus memiliki komite dan fungsi-fungsi tertentu. Secara umum EU dan LJK Terelasi dalam KK Mega Corpora telah memenuhi pembentukan komite sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator.

Namun demikian, Komite Pemantau Risiko pada PT. MAF belum dilengkapi dengan keberadaan Pihak Independen, dan hal tersebut akan dipenuhi pada tahun 2022.

Data pembentukan komite disampaikan pada lampiran 2.

c. Pengadaan kebijakan kepatuhan & kebijakan yang terkait tata kelola

Salah satu aspek dalam infrastuktur tata kelola yang baik pada EU dan LJK Terelasi dalam KK Mega Corpora adalah kelengkapan dan kecukupan kebijakan untuk mendukung penerapan tata kelola, antara lain Pedoman Tata Kelola Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman Kerja Komite, Pedoman Penerapan *Code of Conduct*, Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Remunerasi, Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan & Prosedur Audit, Audit Charter, Kebijakan & Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, Kebijakan APU & PPT dan Kebijakan Perlindungan Konsumen.

EU dan LJK Terelasi pada KK Mega Corpora telah memiliki kebijakan tersebut diatas dan didokumentasikan dengan baik. Data Kelengkapan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan tata Kelola lainnya disampaikan pada lampiran 3.

6. Monitoring Permasalahan Hukum yang Terjadi pada LJK Terelasi sampai dengan Tahun 2021

Permasalahan Hukum	Perusahaan Asuransi		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Efek/MI		BUS		BUK		TOTAL	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap	3	2	0	4	0	0	9	0	805	0	817	6
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	4	0	2	3	0	0	11	0	172	0	189	3
Total Permasalahan Hukum	7	2	2	7	0	0	20	0	977	0	1.006	9

Keterangan :

- Bank Umum : Perselisihan dengan debitur dan pihak ketiga, perselisihan kepemilikan jaminan terkait PKPU/kepailitan, perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum, perselisihan Tata Usaha Negara, Perselisihan Hubungan Industrial, perkara perpajakan.
- Bank Syariah : Perselisihan dengan debitur dan pihak ketiga (Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, Perselisihan dengan rekanan notaris terkait penyelesaian pekerjaan, Perselisihan Kepemilikan Jaminan, Perselisihan terkait dengan isi akad pembiayaan.
- Asuransi : Kesepakatan LAPS (BMAI) oleh Pemegang Polis terkait lapse - 2021, Putusan Perdata PMH atas penggelapan yang dilakukan oleh Bank Penyimpan Deposito Perusahaan - 2019 dan 2020 , Putusan Perdata Wanprestasi karena penolakan klaim (PN Jambi) - 2018, Putusan Pidana Fraud penggelapan 2016, Perselisihan Hubungan Industrial.
- Pembiayaan : Kasus penggelapan / Fraud oleh Pegawai Internal, perbuatan melawan hukum, gugatan wan prestasi.

7. Monitoring Permasalahan Fraud yang Terjadi pada LJK Terelasi selama Tahun 2021

Jumlah kasus Fraud yang terjadi pada perusahaan dalam KK Mega Corpora tahun 2021 (dilakukan oleh pihak internal dengan nominal kerugian lebih besar dari Rp. 100 juta) adalah sbb :

NO	Fraud	BUK	BUS	Asuransi	Pembiayaan	Efek/MI	Total
1	Total Fraud per LJK	1	2	0	0	0	3
2	Telah Diselesaikan	0	1	0	0	0	1
3	Dalam Proses Penyelesaian Internal	0	0	0	0	0	0
4	Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0
5	Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	1	1	0	0	0	2

Selama tahun 2021 kasus fraud hanya terjadi di sektor perbankan (Bank Mega Syariah dan Allo Bank Indonesia) dengan total 3 kasus dan fraud tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Monitoring Sanksi Denda yang dikenakan pada EU dan LJK Terelasi Selama 2021

Selama tahun 2021 regulator telah memberikan sanksi teguran sebanyak 16 kali, dan sanksi denda sebanyak Rp. 4.233.596.666 (frekwensi 34 kali). Pengenaan sanksi denda oleh regulator (BI/OJK) terjadi di Bank Mega, Bank Mega Syariah, Allo Bank Indonesia, PT. AUM, PT. MAF dan PT. MCF yang sebagian besar karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan dari regulator (BI/OJK) seperti kesalahan / keterlambatan pelaporan dan SLIK.

9. Monitoring Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Monitoring fungsi kepatuhan juga dilakukan terhadap penerapan ketentuan APU & PPT sesuai dengan POJK No.23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Seluruh LJK dalam KK Mega Corpora secara umum telah menerapkan APU & PPT sesuai ketentuan OJK, antara lain :

- Membentuk unit kerja khusus yang menangani pelaksanaan APU & PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan / Direktur Utama.
- Melaksanakan pelatihan secara berkala kepada petugas dan pejabat yang melaksanakan APU & PPT.
- Memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan APU & PPT yang telah dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur.

- Melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.

Perincian penerapan APU & PPT pada EU dan LJK Terelasi disampaikan pada lampiran 4.

#### 10. Monitoring Penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen

Secara umum seluruh LJK Terelasi pada KK Mega Corpora telah memenuhi dan menetapkan ketentuan Perlindungan dan Pengaduan Konsumen yang diatur dalam POJK No.01/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan serta PBI No.22/20/PBI/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Seluruh LJK dalam KK Mega Corpora secara umum telah menerapkan Ketentuan Perlindungan Konsumen, antara lain sebagai berikut :

- Membentuk Unit Kerja Khusus / Petugas Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah.
- Memonitor pengaduan nasabah dan kemudian melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mencari solusi penyelesaiannya.
- Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah kepada petugas dan pejabat yang terkait secara berkala, kecuali pada PT. Allo Bank Indonesia, yang tidak mengadakan sosialisasi perlindungan konsumen selama Pandemi Covid-19.
- Melaksanakan komunikasi dan edukasi kepada nasabah dan masyarakat.
- Membuat / melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur internal terkait penerapan perlindungan konsumen.
- Menyampaikan pelaporan terkait pengaduan nasabah ke regulator.
- Penyampaian pelaporan terkait pelaksanaan Perlindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan.

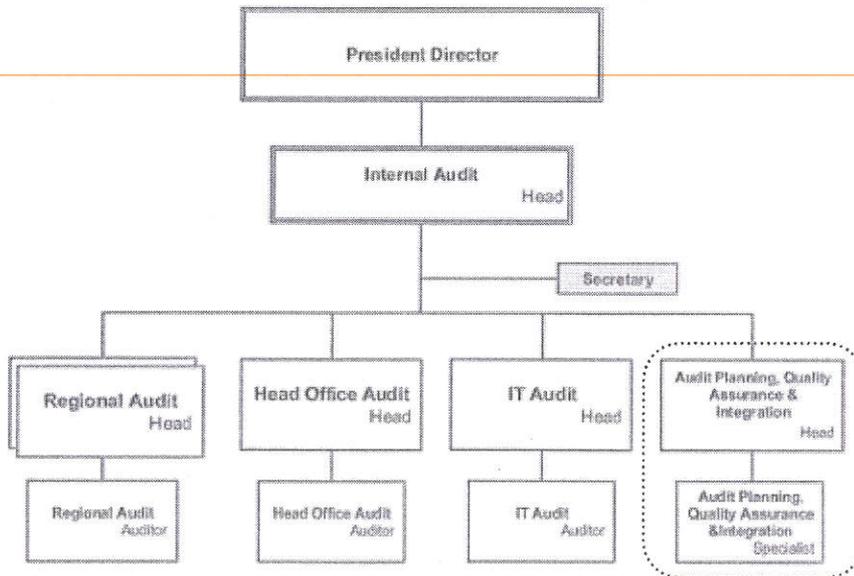
Perincian penerapan Perlindungan Konsumen pada EU dan LJK Terelasi disampaikan pada lampiran 5.

## VIII. SATUAN KERJA AUDIT TERINTEGRASI

### A. Struktur Satuan Kerja Audit Terintegrasi

EU telah membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi sebagaimana SK Direksi EU No.SK 026/DIRBM/21 tanggal 29 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.

tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk. dengan struktur sebagai berikut :



Tugas dan tanggung jawab Internal Audit Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 2) Menyampaikan laporan/temuan audit internal terintegrasi yang signifikan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam KK dan Dewan Komisaris EU

### B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

1. Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integration) pada Unit Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana SK Direksi EU No.SK 026/DIRBM/21 tanggal 29 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK Terelasi terhadap :
  - a. Hasil pemenuhan struktur dan infrastruktur Audit pada LJK Terelasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal	Pengadaan Audit Charter & Pedoman Kerja	Data SDM
1.	PT. Bank Mega, Tbk.	Ada	Ada	41
2.	PT. Bank Mega Syariah	Ada	Ada	13
3.	PT. Allo Bank Indonesia, Tbk	Ada	Ada	4
4.	PT. PFI Mega Life	Ada	Ada	3
5.	PT. Asuransi Umum Mega	Ada	Ada	3
6.	PT. Mega Capital Investama	Ada	Ada	1
7.	PT. Mega Aset Management	Ada	Ada	1
8.	PT. Mega Capital Sekuritas	Ada	Ada	2
9.	PT. Mega Auto Finance	Ada	Ada	11
10.	PT. Mega Central Finance	Ada	Ada	10
11.	PT. Mega Finance	Ada	Ada	7

- b. Rencana Kerja dan Realisasi Kerja Audit Internal LJK Terelasi serta kelengkapan/pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal selama tahun 2021 :

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Rencana Kerja Tahun 2021	Realisasi Kerja Tahun 2021	Laporan Hasil Pemeriksaan
1.	PT. Bank Mega, Tbk	202	202 (100%)	Ada
2.	PT. Bank Mega Syariah	97	97 (100%)	Ada
3.	PT. Allo Bank Indonesia	26	29 (112%)	Ada
4.	PT. PFI Mega Life	7	7 (100%)	Ada
5.	PT. Asuransi Umum Mega	10	10 (100%)	Ada
6.	PT. Mega Capital Investama	10	10 (100%)	Ada
7.	PT. Mega Aset Management	8	8 (100%)	Ada
8.	PT. Mega Capital Sekuritas	11	11 (100%)	Ada
9.	PT. Mega Auto Finance	48	48 (100%)	Ada
10.	PT. Mega Central Finance	48	48 (100%)	Ada
11.	PT. Mega Finance	27	27 (100%)	Ada

- c. Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal dan hasil pemeriksaan audit OJK/BI/BEI pada tahun 2021 :

NO	Nama Perusahaan	Pemeriksaan / tindak lanjut Auditor Internal	Pemeriksaan / tindak lanjut OJK/BI/BEI
1.	PT. Bank Mega, Tbk	Sudah Diaudit / 100%	Sudah Diaudit / Done
2.	PT. Bank Mega Syariah	Sudah Diaudit / 100%	Sudah Diaudit / Done
3.	PT. Allo Bank Indonesia, Tbk	Sudah Diaudit / 100%	Sudah Diaudit / Done
4.	PT. PFI Mega Life	Sudah Diaudit / 100%	Belum Diaudit
5.	PT Asuransi Umum Mega	Sudah diaudit / 100%	Belum Diaudit
6.	PT Mega Capital Investama	Sudah Diaudit / 100%	Belum diaudit
7.	PT Mega Aset Management	Sudah Diaudit / 100%	Belum diaudit
8.	PT Mega Capital Sekuritas	Sudah Diaudit / 100%	Belum Diaudit
9.	PT Mega Auto Finance	Sudah Diaudit / 100%	Belum Diaudit
10.	PT Mega Central Finance	Sudah Diaudit / 100%	Belum Diaudit
11.	PT Mega Finance	Sudah Diaudit / 100%	Belum Diaudit

- d. Membuat dan menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan audit intern untuk LJK Terelasi yang disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris EU serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan EU.
- e. Membuat rekomendasi hasil audit yaitu agar masing-masing LJK:
- Meningkatkan kualitas penerapan *internal control* dan efektivitas pengawasan aktif atasan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
  - Meningkatkan pemahaman terhadap risiko dalam setiap aktivitas operasionalnya dan secara berkesinambungan selalu dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku.
  - Meningkatkan *awareness* pegawai dalam penerapan budaya patuh, meningkatkan monitoring dan mencegah terjadinya temuan audit intern yang berpotensi menjadi *fraud*.
  - Menerapkan *reward and punishment* secara konsisten sebagai bentuk upaya peningkatan budaya patuh.
  - Meningkatkan ketelitian dan ketepatan waktu dalam pembuatan pelaporan.
  - Melakukan monitoring tindak lanjut perbaikan atas hasil temuan audit.

## IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

### A. Struktur dan infrastruktur Manajemen Risiko Terintegrasi, sebagai berikut :

1. Penunjukan EU yang berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan dan pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sebagaimana Surat Keputusan PT Mega Corpora No. 013/Dir-CTC/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penunjukkan PT Bank Mega, Tbk. sebagai EU dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Group Mega Corpora.
2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk Support Group - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing LJK Terelasi dilakukan dengan Surat Keputusan Direksi EU, dan terakhir dilakukan pengkinian dengan Surat Keputusan Direksi No.057/DIRBM/21 tanggal 20 September 2021 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
3. EU telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, dan telah melakukan pengkinian terakhir melalui Surat Keputusan Direksi No.003/DIRBM/22 tanggal 17 Januari 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

### B. Proses Manajemen Risiko Terintegrasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. SKMRT telah melaporkan perubahan keanggotaan LJK Terelasi pada KK Mega Corpora kepada OJK :
  - a. Surat No.079/DIRBM-MIRG/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan Grup Mega Corpora. Atas perubahan ini telah dicatat dan diadministrasikan oleh OJK melalui surat OJK No.S-66/PB.31/2021 tanggal 18 April 2021.
  - b. Surat No.183/DIRBM-MIRG/2021 tanggal 5 Juli 2021 perihal Perubahan Nama Salah Satu Anggota KK Mega Corpora. Atas perubahan ini telah dicatat dan diadministrasikan oleh OJK melalui surat OJK No.S-146/PB.31/2021 tanggal 29 Juli 2021.
2. Aktivitas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi :
  - a. Melakukan rapat Komite Manajemen Risiko (KMRT) sebanyak 4 kali dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Notulen Rapat	Kehadiran Anggota Komite (%)
1.	05 Februari 2021	001/MIRG-KMRT/2021	100%
2.	06 Mei 2021	002/MIRG-KMRT/2021	100%
3.	06 Agustus 2021	003/MIRG-KMRT/2021	100%
4.	04 November 2021	004/MIRG-KMRT/2021	100%

- b. Melaksanakan rapat Support-Group MRT sebanyak 17 (tujuh belas) kali.

3. Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi

- a. SKMRT telah membuat kerangka pengisian data untuk menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko di setiap LJK. Dengan menggunakan kerangka tersebut, setiap LJK telah melakukan proses identifikasi dan pengukuran sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha masing-masing.
- b. Profil Risiko Terintegrasi Semester I & II Tahun 2021 masing-masing adalah 2 (dua).

Profil Risiko	Periode Juni 2021			Periode Desember 2021		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Operasional	Low	Satisfactory	1	Low to Moderate	Satisfactory	2
Stratejik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	1
Hukum	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1
Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2
Reputasi	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1
Transaksi Intra-Grup	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1
Asuransi	Low	Satisfactory	1	Low	Strong	1
Peringkat Komposit			2			2

Laporan secara lengkap mengenai Profil Risiko Terintegrasi telah disampaikan terpisah kepada OJK :

- Semester I - 2021 melalui Surat No.011/MIRG-SKOJK/21 tanggal 13 Agustus 2021 perihal :
  - Laporan Profil Risiko Terintegrasi Periode Semester I Tahun 2021.
  - Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Periode Semester I Tahun 2021.
  - Dokumen Pendukung Perjanjian Kerja Sama (PKS).

- Semester II - 2022 melalui Surat No.004/MIRG-SKOJK/22 tanggal 14 Februari 2022 perihal :
  - Laporan Profil Risiko Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2021.
  - Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2021.
  - Dokumen Pendukung Perjanjian Kerja Sama (PKS)

## X. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

EU telah melakukan pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.SK.051/DIRBM/21 tanggal 7 September 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KK Mega Corpora, dengan cakupan sebagai berikut :

- A. Kerangka Tata kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat hal-hal berikut :
1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
  2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
  3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (termasuk pengaturan tentang pelaksanaan rapat komite)
  4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
  5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- B. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah mencakup Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan, yakni :
1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
  2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
  3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
  4. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
  5. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
  6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
  7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
  8. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
  9. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
  10. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
  11. Kebijakan remunerasi;
  12. Pengelolaan benturan kepentingan.
- C. Kewajiban penyampaian laporan terkait Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada OJK, berupa :
1. Laporan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
  2. Laporan Penilaian (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara semesteran.
  3. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Pada tahun 2021, EU telah melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut sesuai ketentuan.

## XI. TRANSAKSI INTRA GROUP

Kebijakan terkait Transaksi Intra Group KK Mega Corpora tertuang dalam :

1. Surat Keputusan Direksi No.003/DIRBM/22 tanggal 17 Januari 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi (pengkinian dari SK Direksi No. 096/DIRBM/20 tanggal 30 Desember 2020), mengatur tentang proses identifikasi, pengelolaan, pengukuran dan pengendalian internal atas transaksi intra grup.
2. Surat Keputusan Direksi No.004/DIRBM/22 tanggal 17 Januari 2022 tentang Kebijakan Rekonsiliasi Transaksi Intra Group Mega Corpora (pengkinian dari SK Direksi No. 054/DIRBM/18 tanggal 6 Juni 2018).

Risiko Transaksi Intra Grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko Inheren yang wajib dikelola oleh seluruh LJK (termasuk Entitas Utama), antara lain:

1. Transaksi aset Intra Grup;
2. Transaksi kewajiban Intra Grup;
3. Transaksi pendapatan Intra Grup;
4. Transaksi biaya Intra Grup;
5. Dokumentasi dan kewajiban transaksi;
6. Informasi lainnya, meliputi:
  - a. Sentralisasi manajemen terkait dengan likuiditas jangka pendek.
  - b. Dukungan Intra Grup tidak mengikat secara hukum dan/atau tidak dapat dieksekusi.
  - c. Operasional transaksi di mana satu perusahaan bertindak dengan atau atas nama dari perusahaan lain dalam grup.
  - d. Penyediaan jasa manajemen dan jasa lainnya seperti kegiatan back office antar perusahaan dalam satu grup.
  - e. Pembelian atau penjualan aset kepada perusahaan lain dalam satu grup.

Transaksi Intra Grup dimonitor setiap bulan melalui mekanisme rekonsiliasi transaksi intra group antar LJK dan dibahas dalam meeting antara SKMRT dengan LJK Terelasi.

Transaksi intra group dalam KK Mega Corpora telah dimonitor dan diukur tingkat risikonya sebagai salah satu bagian dari Profil Risiko Terintegrasi KK Mega Corpora dan dilaporkan kepada OJK secara semesteran. Laporan secara lengkap mengenai Profil Risiko Terintegrasi telah disampaikan terpisah kepada OJK melalui :

1. Semester I-2021 melalui Surat No.011/MIRG-SKOJK/21 tanggal 13 Agustus 2021 perihal :
  - Laporan Profil Risiko Terintegrasi Periode Semester I Tahun 2021.
  - Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Periode Semester I Tahun 2021.
  - Dokumen Pendukung Perjanjian Kerja Sama (PKS).
  
2. Semester II-2022 Surat No.004/MIRG-SKOJK/22 tanggal 14 Februari 2022 perihal :
  - Laporan Profil Risiko Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2021.
  - Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2021.
  - Dokumen Pendukung Perjanjian Kerja Sama (PKS).

---

Rincian mengenai Perjanjian Kerjasama (PKS) Transaksi Intra Group KK Mega Corpora disampaikan pada lampiran 6.

---

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan

### A. LJK Terelasi Bank

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	Bank	PT. Bank Mega	PT. Allo Bank Indonesia
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki Direktur Kepatuhan	Memiliki Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Memiliki Direktur Risk & Compliance
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & AML)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)
<p>Keterangan :</p> <p>Struktur Kepatuhan Bank Mega dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2021, sedangkan pada Allo Bank Indonesia pada Semester II - 2021 telah mengangkat Direktur Manajemen Risiko &amp; Kepatuhan yang baru a.n. Bp. Ganda Raharja Rusli (Diangkat berdasarkan Akta Notaris No. 10 Tanggal 18 Oktober 2021) dan telah lulus PKK OJK berdasarkan KEP-70/PB.1/2021 Tanggal 14 Desember 2021)</p> <p>Diatur dalam ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum</li> <li>• POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum</li> <li>• PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah</li> </ul>			

### B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
	Perusahaan Perasuransian	PT Asuransi Umum Mega
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki (Direktur Enterprise Risk Mananagement (ERM), Legal & Compliance )	Memiliki (Direktur Kepatuhan)
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja ERM, Legal & Compliance)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG )
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi tehnik asuransi, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan in- dependensi dibawah Direktur ERM, Legal & Compliance	Direktur Kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi teknik asuransi, pemasaran dan keuangan.
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perusahaan Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki struktur Kepatuhan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2021.</li> <li>■ Sesuai dengan POJK No. 43/POJK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019 Perihal Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian: Pasal 8 Ayat 1, Perusahaan wajib menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</li> </ul>		

### C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	Perusahaan Pembiayaan	PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki (Direktur Utama)	Memiliki (Direktur Utama)	Memiliki (Direktur Utama)
b. Wajib memiliki Satuan kerja atau pegawai yang melak-sanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Unit Kepatuhan)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi pem-biaya-an, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama
<p>Keterangan :</p> <p>Perusahaan Pembiayaan dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki struktur Kepatuhan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2021. Rangkap jabatan Direktur Utama sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak melanggar ketentuan.</p> <p>Diatur dalam ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ POJK No.30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan</li> <li>■ POJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 30/POJK.05 /2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan</li> </ul>			

### D. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK			
	Perusahaan Efek	PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
a. Perusahaan PPE/PEE Perusahaan perantara pedagang efek wajib memiliki fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Internal Audit & Compliance)			
b. Perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal		Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan / Audit Internal/ KYC)	Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan & Audit Internal)	
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak diatur (tidak diwajibkan) dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2021.</li> <li>■ Perusahaan Efek telah memiliki struktur tata kelola dalam bentuk fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan untuk PPE/PEE atau Manajer Investasi dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2021.</li> </ul> <p>Diatur dalam ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ POJK No. 10/POJK.04/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi</li> <li>■ POJK No.57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek &amp; Perantara Pedagang Efek.</li> <li>■ POJK No.24/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi</li> <li>■ POJK No.43/POJK.04/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi</li> </ul>				

Lampiran 2. Pembentukan Komite - Komite & Fungsi-Fungsi

A. LJK Terelasi Perbankan

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PERBANKAN	PT. BANK MEGA	PT Allo Bank
<b>Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris</b>			
<b>Komite Audit</b>	<p>SK.No.087/DIRBM/17 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Komite Audit PT Bank Mega Tbk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Achjadi Ranuwisastro (Ketua/ Komisaris Independen)</li> <li>▪ Iramady Irdja (Anggota/Pihak Independen)</li> <li>▪ Adrial Salam (Anggota/Pihak Independen)</li> </ul>	<p>SK Direksi No.025/SK-DIR/VI/2021 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. R. Soedaryatmo Y. (Ketua)</li> <li>2. Slamet Agus Pramono (Anggota)</li> <li>3. Wan Maraden Sinaga (Anggota)</li> </ol>	<p>SK Direksi PT. BMS No.KEP.015/ DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Audit PT. Bank Mega Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rachmat Maulana (Ketua/ Komisaris Independen)</li> <li>▪ Muhammad Syafi'i Antonio (Anggota/Pihak independen)</li> <li>▪ Misbahul Ulum (Anggota/Pihak independen)</li> </ul>
<b>Komite Pemantau Risiko</b>	<p>SK.No.056/DIRBM/18 Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Tbk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aviliani (Ketua/Komisaris Independen)</li> <li>▪ Purwo Junianto (Anggota/Pihak Independen)</li> <li>▪ Ivan Purnama Sanoesi (Anggota/Pihak Independen)</li> </ul>	<p>SK Direksi No.026/SK-DIR/VI/2021 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. R. Soedaryatmo Y. (Ketua)</li> <li>2. Slamet Agus Pramono (Anggota)</li> <li>3. Wan Maraden Sinaga (Anggota)</li> </ol>	<p>SK Direksi PT. BMS No.KEP.016/ DIRBMS /20 tanggal 21 September 2020 Tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rachmat Maulana (Ketua/Komisaris Independen)</li> <li>▪ Muhammad Syafi'i Antonio (Anggota/Pihak independen)</li> <li>▪ (Misbahul Ulum) Anggota/Pihak independen)</li> </ul>
<b>Komite Remunerasi &amp; Nominasi</b>	<p>No.SK.037/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Tbk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Achjadi Ranuwisastro (Ketua/Komisaris Independen)</li> <li>▪ Yungky Setiawan (Anggota /Komisaris)</li> <li>▪ Anwar V Purba (Anggota/Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM)</li> </ul>	<p>SK.No.027A/SK-DIR/VI/2021 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.R. Soedaryatmo Y. (Ketua)</li> <li>2.Ali Gunawan (Anggota)</li> <li>3. Mariawati Tjitradinata (Anggota)</li> </ol>	<p>SK Direksi PT. BMS No.KEP.003/ DIRBMS/21 Tanggal 23 April 2021 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Muhamad Nuh (Komisaris Utama/Ketua/ Komisaris Independen)</li> <li>▪ Nasaruddin Umar (Anggota/ Komisaris Independen)</li> <li>▪ Sonny Rastiono (Pimpinan Divisi HCMD)</li> </ul>

Pembentukan Komite pada Direksi			
Komite Produk Dan Proses Penerbitan Produk Atau Aktivitas Baru	SK.No.086/DIRBM/18 Tanggal 26 Oktober 2018	SK. No.029/DIRAB/21	SK.No.SKEP.002/ DIRBMS/20 Tanggal 3 Februari 2020
Komite Teknologi Informasi	SK.No.089/DIRBM/20 Tanggal 12 November 2020	SK No.025/DIRAB/21	SK.No.SKEP.018/ DIRBMS/20 Tanggal 6 November 2020
Komite Manajemen Risiko	SK.No.042/DIRBM/21 Tanggal 30 Juli 2021	SK.No.026/DIRAB/21	SK.No.SKEP.017/ DIRBMS/20 Tanggal 16 Oktober 2020
Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee)	SK.No. 061/DIRBM/14 Tanggal 11 Juli 2014	SK. No.028/DIRAB/21	SK. No.KEP.009.1/ DIRBMS/19 tanggal 4 September 2019
Komite Asset Liabilities Committee (ALCO)	SK.No.055/DIRBM/21 Tanggal 15 September 2021	SK. No.039/DIRAB/21	SE No. SE.058/DIRBMS/18 tanggal 20/06/2018
Komite Kredit / Komite Persetujuan Pembiayaan	SK.No.044/DIRBM/20 Tanggal 30 Maret 2020	SK.No.003X/DIRAB/21	SK.No. SKEP.012/DIRBMS/20, tanggal 4 September 2020
Komite Kebijakan Perkreditan / Pembiayaan	SK.No.053/DIRBM/14 tanggal 5 Juni 2014	SK.No.027/DIRAB/21 tanggal 27 Juni 2021	SK.No.SKEP.004/ DIRBMS/20 tanggal 21 Februari 2020
Komite Manajemen Krisis	SK.No.054/DIRBM/21 tanggal 9 September 2021	-	-

## B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
	PT ASURANSI UMUM MEGA	PT PFI MEGA LIFE DH. PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
<b>Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris</b>		
Komite Audit	SK No.017/SK/DIR-AUM/DIR-AUM/IV/2021 tanggal 1 April 2021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Djazoeli Sadhani (Ketua/ Komisaris Independen)</li> <li>Heru Absoro (Anggota-Pihak Independen)</li> <li>Benny Barlianto (Anggota)</li> <li>Diang Adelina (Anggota)</li> <li>Syofia Rani (Anggota)</li> </ul>	SK Dekom tanggal 22 April 2021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Firdaus Djaelani (Ketua/ Komisaris Independen)</li> <li>Ratna Januarita (Komisaris Independen /Anggota)</li> <li>Pavan Dhamija (Komisaris /Anggota)</li> <li>Henra A. Lasut (Pihak Independen)</li> </ul>
Komite Pemantau Risiko	SK No.016/MI/SK/DIR-AUM/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nisfu Chasbullah (Ketua/ Komisaris Independen)</li> <li>Diang Adelina (Anggota)</li> <li>Lily Indrayanti (Anggota)</li> <li>Adrianus Suprastio (Anggota)</li> <li>Adam Abdurachman (Anggota)</li> </ul>	SK Dekom No. 017/DIR-PML /XI/18 tanggal 21 November 2018 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Ratna Januarita (Ketua/ Komisaris Independen)</li> <li>Farmawaty /Komisaris Utama (Anggota)</li> <li>Pavan Dhamija/Komisaris (Anggota)</li> </ul>
<b>Pembentukan Komite Pada Direksi</b>		
Komite Investasi	SK No.028/SK/DIR-AUM/IV/2021 tanggal 29 April 2021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Agustina - Direktur Keuangan (Ketua)</li> <li>Harianto Wirawan - Direktur Operasional &amp; IT (Anggota)</li> <li>Lukman Siregar - Direktur</li> </ul>	SK DIR No.021/DIRR-PML /VI/21 tanggal 29 Juni 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>Samdarshi Sumit (Ketua)</li> <li>Meilani Setiawan (Anggota)</li> <li>Nany Natalia (Anggota)</li> <li>Yusuf Abdullah (Anggota)</li> </ul>

	ERM, Legal & Compliance (Anggota) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fikri Syuhada</li> <li>▪ Diang Adelina (Anggota)</li> <li>▪ Syofia Rani (Anggota)</li> <li>▪ Arvan Aulia (Anggota)</li> </ul>	
Komite Pengembangan Produk /Komite Produk	SK No.013/DIR-AUM/IV/2021 tanggal 5 April 2021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indrajaya Wardhana (Ketua)</li> <li>▪ Diang Adelina (Anggota)</li> <li>▪ Budi Mulyanto (Anggota)</li> <li>▪ Kurniawan (Anggota)</li> </ul>	SK DIR No.013/DIR-PML /VI/21 tanggal 30 Juni 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samdarshi Sumit (Ketua)</li> <li>▪ Meiliana Setiawan (Anggota)</li> <li>▪ Hani Kusumowardhani (Anggota)</li> <li>▪ Nany Natalia (Anggota)</li> <li>▪ David Bernard Rudolfhees (anggota)</li> </ul>

### C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	PT MEGA FINANCE	PT MEGA AUTO FINANCE
<b>Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris</b>			
Wajib memiliki memiliki Komite Audit (untuk Perusahaan dengan asset lebih dari Rp 200 M)	SK Dekom No. 086 /DEKOM/XII/2021 tgl 29/12/21 tentang Komite Audit (Revisi SK DEKOM No.003/DEKOM/I/2021 tanggal 28/1/2021) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Togar Sinaga (Ketua Komisaris Independen)</li> <li>▪ Susilo Sudjono (Anggota/Pihak Independen)</li> <li>▪ Wahyu Tri Kuncarawati (Anggota)</li> </ul>	SK Dekom No.00021-BRISK - MAF-XII tanggal Desember 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngalim Sawego (Ketua / Komisaris Independen)</li> <li>▪ Susilo Sudjono (Anggota/Pihak Independen)</li> </ul>	SK Dekom No.00022-BRISK-MCF-XII tanggal 22 Maret 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngalim Sawego (Ketua / Komisaris Independen)</li> <li>▪ Yafieka Lestiyani (Anggota)</li> <li>▪ Susilo Sudjono (Anggota/Pihak Independen)</li> </ul>
Wajib memiliki memiliki Komite Pemantau Risiko (untuk Perusahaan dengan asset lebih dari Rp 200 M)	SK Dekom No. 085 /DEKOM/XII/2021 tgl 29/12/21 tentang Kpmite Pemantau Risiko (Revisi SK DEKOM No.005/DEKOM/I/2021 tanggal 28/1/2021) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Togar Sinaga (Ketua Komisaris Independen)</li> <li>▪ Susilo Sudjono (Anggota/Pihak Independen)</li> <li>▪ Adelia Yohanna (Anggota)</li> </ul>	SK Dekom No.00023-BRISK - MAF -XII tanggal Desember 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngalim Sawego (Ketua / Komisaris Independen)</li> <li>▪ Farmawati (Anggota)</li> </ul>	SK Dekom No.00011-LGL-MCF -III tanggal 22 Maret 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngalim Sawego (Ketua / Komisaris Independen)</li> <li>▪ Yafieka Lestiyani (Anggota)</li> <li>▪ Susilo Sudjono (Anggota/Pihak Independen)</li> </ul>

Wajib memiliki memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi (untuk Perusahaan dengan asset lebih dari Rp 200 M)	SK Dekom No. 084 /DEKOM/XII/2021 tgl 29/12/21 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi (Revisi SK DEKOM No.004/DEKOM/I/2021 tanggal 28/1/2021) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Togar Sinaga (Ketua Komisaris Independen)</li> <li>▪ Susilo Sudjono (Anggota/Pihak Independen)</li> <li>▪ Adelia Yohanna (Anggota)</li> </ul>	SK Dekom No.00024-BRISK - MAF -XII tanggal Desember 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngalim Sawego (Ketua / Komisaris Independen)</li> <li>▪ Wiwi Kurnia (Anggota)</li> <li>▪ Yenti (Anggota)</li> </ul>	SK Dekom No.00020-MCF-V-2021 tanggal 26 Mei 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngalim Sawego (Ketua / Komisaris Independen)</li> <li>▪ Farmawati (Anggota)</li> <li>▪ Linawaty (Anggota)</li> </ul>
<b>Pembentukan Komite pada Direksi</b>			
Komite Manajemen Risiko	SK No.006/DIR/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iwan Setiawan (Ketua)</li> <li>▪ Betty Herawat (Anggota)</li> <li>▪ Hermawan Ariyanto (Anggota)</li> <li>▪ Asmadi Sutanto (Anggota)</li> <li>▪ Adelia Yohana (Anggota)</li> </ul>	SKD No.00025-BRISK-MAF-XII-2021 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melly Armeilia (Ketua)</li> <li>▪ Andi Christian (Anggota)</li> </ul>	SKD No.00023-BRISK-MCF-XII-2021 tanggal 29 Desember 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rudy Santoso (Ketua)</li> <li>▪ Kurnia Elly P (Anggota)</li> </ul>
Komite Aset & Liabilitas	SK No.015/DIR /III/2021 tanggal 31 Maret 2021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iwan Setiawan (Ketua)</li> <li>▪ Betty Herawat (Anggota)</li> <li>▪ Hermawan Ariyanto (Anggota)</li> <li>▪ Ahmad Nasrullah (Anggota)</li> <li>▪ Rony Alfian (Anggota)</li> </ul>	N.A	N.A
Komite Lainnya (Tidak Wajib)			
Komite Kepatuhan	-	SKD No.00022-BRISK-MAF-XII-2021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melly Armeilia (Ketua)</li> <li>▪ Asikin (Anggota)</li> <li>▪ Sunardi (Anggota)</li> <li>▪ Rizky Vidrian (Anggota)</li> <li>▪ Andi Christian (Anggota)</li> </ul>	SKD No.00025-BRISK-MCF-XII-2021 tanggal 30 Desember 2021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rudy Santoso (Ketua)</li> <li>▪ Kurnia Elly P (Anggota)</li> </ul>
<b>Pembentukan Fungsi - Fungsi pada Perusahaan</b>			
1. Fungsi Kepatuhan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Pengenalan Nasabah	Memiliki	Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Pengaduan Debitur	Memiliki	Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Pengendalian Internal	Memiliki	Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran	Memiliki	Memiliki	Memiliki

6. Fungsi Analisis Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
7. Fungsi Pemantauan Kualitas Piutang Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Penagihan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki	Memiliki	Memiliki

#### D. LJK Terelasi Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Pembentukan Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PT.MEGA CAPITAL SEKURITAS	PT.MEGA ASSET MANAGEMENT	PT.MEGA CAPITAL INVESTAMA
<b>PERUSAHAAN EFEK</b>			
<b>PEMBENTUKAN FUNGSI-FUNGSI PADA PERUSAHAAN</b>			
<b>a. Perusahaan PPE/PEE</b>			
1. Fungsi Pemasaran	Memiliki		
2. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki		
3. Fungsi Pembukuan	Memiliki		
4. Fungsi Kustodian	Memiliki		
5. Fungsi Teknologi Informasi	Memiliki		
6. Fungsi Kepatuhan	Memiliki		
7. Fungsi Riset (Optional)	Memiliki		
8. Penerapan prinsip Mengenal Nasabah	Memiliki		
<b>b. Perusahaan Manajer Investasi</b>			
1. Fungsi Investasi dan Riset		Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Perdagangan		Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek		Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal		Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah		Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Teknologi Informasi		Memiliki	Memiliki
7. Fungsi akuntansi dan Keuangan		Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Pengembangan SDM		Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Penerapan Pengenalan Nasabah		Memiliki	Memiliki

Lampiran 3. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan Terkait Tata Kelola yang baik

A. LJK Perbankan

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN ASURANSI		
		PT.BANK MEGA	PT.BANK MEGA SYARIAH	PT. Allo Bank Indonesia
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SK No. 039/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020	SE.No.075/DIRBMS/15 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Kebijakan Operasi Tata Kelola	SK Direksi No.131/DIRAB/21 tanggal 22 Oktober 2021
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SK. No. 038/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020	SE.027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dekom, Direksi, dan DPS	SK Direksi No.131/DIRAB/21 tanggal 22 Oktober 2021
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dekom (masing-masing Komite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Dekom No. 006/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)</li> <li>▪ SK Dekom No.007/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko</li> <li>▪ SK Dekom No.005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Remunerasi dan Nominasi</li> </ul>	SE.No.028/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Kerja Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Direksi No.022/DIRAB/21 tanggal 1 Juli 2021 tentang Komite Audit</li> <li>▪ SK Direksi No.023/DIRAB/21 tanggal 1 Juli 2021 tentang Komite Pemantau Risiko</li> <li>▪ SK Direksi No.024/DIRAB/21 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pedoman Komite Nominasi &amp; Remunerasi.</li> </ul>
4.	Panduan Bagi Komite (Committee Manual)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Dekom No. 006/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)</li> <li>▪ SK Dekom No.007/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko</li> <li>▪ SK Dekom No.005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Remunerasi dan Nominasi</li> </ul>	SE.No.028/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Kerja Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Direksi No.022/DIRAB/21 tanggal 1 Juli 2021 tentang Komite Audit</li> <li>▪ SK Direksi No.023/DIRAB/21 tanggal 1 Juli 2021 tentang Komite Pemantau Risiko</li> <li>▪ SK Direksi No.024/DIRAB/21 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pedoman Komite Nominasi &amp; Remunerasi.</li> </ul>

5.	Panduan Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS Manual)	N.A	SE.027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dekom, Direksi, dan DPS	N.A
6.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SK No. SK: 055/DIRBM/20 tanggal 12 Juni 2020 tentang Komitmen Integritas.  SE No. 148/DIRBM-PMOC/20 Tentang Pelaksanaan E-Komitmen Integritas	SE No.005/DIRBMS/15 tanggal 23 Januari 2015	SK Direksi No.012/SK-DIR/II/2017 tanggal 03 Februari 2017
7.	Kebijakan Akuntansi LJK	Comply (telah diatur tentang penggunaan buku besar dan ketentuan pendukung akuntansi lainnya)	SE No.001/DIRUT/SE/VI/05 tanggal 27 September 2005 tentang Kebijakan Akuntansi	SOP No.011-SOP-AKT-VI-2016 tanggal 29 Juni 2016
8.	Kebijakan Remunerasi	081/DIRBM-HCRO/18 tentang Revisi Pertama Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Mega Tbk	SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi	SK No.024/DIRAB/21 tanggal 1 Juli 2021 tentang Komite Nominasi & Remunerasi
9.	Kebijakan Fungsi Kepatuhan	SK Direksi No.058 DIRBM/21 tanggal 21 September 2021 tentang Kebijakan Kepatuhan	SE No.094/DIRBMS/18 Tanggal 12 Oktober 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2  SE.083/DIRBMS/16 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Prosedur Operasional Kepatuhan	SK.DIR.No.129/DIRAB/21 tanggal 20 Oktober 2021 tentang Kebijakan Kepatuhan (Compliance Policy)
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SE.No.029/DIRBM - IADT/22 Tanggal 1 Maret 2022 tentang Pedoman Kerja Internal Audit	SE No.030/DIRBMS/17 Tanggal 12 April 2017 tentang Kebijakan Umum Audit Revisi 1  SE.013/DIRBMS/20 Tanggal 12/02/2020 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern	Buku Pedoman Audit Versi 4.0 tanggal 31 Oktober 2019
11.	Audit Charter	Internal Audit Charter tanggal 31 Mei 2019	SK No.KEP 004/DIRBMS /19 Tanggal 29 April 2019	Internal Audit Charter tanggal 1 Desember 2021
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SK.No.046/DIRBM/21 Tanggal 25 Agustus 2021 tentang Kebijakan Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan	SE No.092/DIRBMS/18 Tanggal 10 Oktober 2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan Revisi 2	SK Direksi No.004/SK-DIR/I/2017 tanggal Januari 2017
13.	Compliance Charter	N.A	SE.059/DIRBMS/18 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (Compliance Charter)	N.A

14.	Kebijakan Anti Fraud	SK.No.40/DIRBM/20 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud	SE No.011/DIRBMS/20 Tanggal 25 Februari 2020 tentang Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud	SOP No.006/SOP/SKAI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020
15.	Kebijakan Perlindungan Konsumen	SK. No. 042/DIRBM /17 tanggal 31 Maret 2017 tentang Kebijakan Perlindungan Konsumen PT Bank Mega, Tbk.	SE.052/DIRBMS/16 Tanggal 20 Juli 2016 tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan	SK Direksi No.009/DIRAB/21 tanggal 1 Juli 2021
		SE No.195/DIRBM-PMOC/21 Tanggal 23 Desember 2021 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Pada Kantor Cabang	SE.014/DIRBMS/20 Tanggal 28 Februari 2020 tentang Kebijakan Operasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	SK Direksi No.130/DIRAB/21 tanggal 21 Oktober 2021
16	Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme			

## B. LJK Terelasi Perusahaan Asuransi

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN ASURANSI	
		PT ASURANSI UMUM MEGA	PT PFI Mega Life dh. PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan	No.025/SK/DIR-AUM/V/2021 Tanggal 19 Mei Desember 2021	KEP.013/DIRR-PML/VII/20 Tanggal 29 Juli 2020
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	No.22/MI/DIRUT-UTA/XII/ 2018 Tanggal 14 Desember 2018	SK.021/DIR-PML/IV/19 Tanggal 11 April 2019
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dekom (masing-masing Komite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 260/MI/DIR-AUM/XII/2021 Tanggal Desember 2021 tentang Pedoman Kerja Departemen Audit PT AUM</li> <li>▪ 029/MI/SK/DIR-AUM/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pemberlakuan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko</li> <li>▪ SE.No 025/SK/DIR-AUM/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Kerja Komite TKT Perusahaan Yang Baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KEP.001/KOM-PML/X/19 Tanggal 21 November 2019 (Piagam Komite Audit)</li> <li>▪ SK.No.002/KOM-PML/XI/19 Tanggal 21 November 2019 (Piagam Komite Pemantau Risiko)</li> </ul>
4.	Panduan Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS Manual)	No.004/MI/SE/DIR-AUM/V/2018 Tanggal 25 Mei 2018	KEP.No.015/DIRR-PML/VII/20 Tanggal 30 Juli 2020 Tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah
5.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	No. 023/MI/DIR-AUM/VII/20 Tanggal 1 Juli 2020	SE.No.001/DIRR-PML/VIII/19 Tanggal 5 Agustus 2019
6.	Kebijakan Akutansi LJK	No.108/MI/DIR-AUM/VI/2020 Tanggal 4 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No.001/SK/FIN-PML/VIII/19 Tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Penerimaan Premi dan Pendebetan Premi</li> <li>▪ No.005/AJMI/ACD/1-16 SOP Tanggal 18 Januari 2016</li> </ul>

			Tentang SOP Rekonsiliasi Bank
7.	Kebijakan Remunerasi	No,019/MI/SK/DIR-UTA/XI/2018 Tanggal 11 Nov 2018	SK. No.005/DIRR-PML/I/2019 Tanggal 24 Januari 2019 Tentang Kebijakan Remunerasi Karyawan
8.	Kebijakan Fungsi Kepatuhan	No.014/SK/MI/DIR-AUM/X/ 18 Tanggal 16 Oktober 2018	SK.No.021/DIR-PML/XI/19 Tanggal 27 November 2019 Tentang Kebijakan Kepatuhan
9	Compliance Charter	No.014/MI/SK/DIR-UTA/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018	N.A
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	No.260/MI/DIR-AUM/XII/2021 Tanggal 1 Desember 2021	SK No.004/DIR-MI/I/2017 Tanggal 23 Januari 2017
11.	Audit Charter	No.108/MI/DIR-AUM/VI/2020 Tanggal 4 Juni 2020	KEP.001/KOM-PML/XI/19 Tanggal 21 November 2019
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	No.055/SK/MI/DIR-UTA/ X/18 Tanggal 16 Oktober 2018	SE.No.001/DIRR-PML/VIII/19 Tanggal 5 Agustus 2019
13.	Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud	No.003/MI/SK/DIR-UTA/VII/2018 Tanggal 2 Juli 2018	SK.No.014/DIR-PML/III/19 Tanggal 13 Maret 2019 Tentang Penetapan Kebijakan Anti-Fraud
14.	Kebijakan Pelindungan Konsumen	No.023/MI/SK/DIR-UTA/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018	SK. No. 014 / DIR.ML / III /19 Tanggal 08 Maret 2019 Tentang Penunjukan Unit Layanan Pengaduan Konsumen
15.	Kebijakan APU PPT	No.020/MI/SK/DIR-UTA/XI/2018 Tanggal 20 November 2018	SK.KEP/DIRRCR-PML/III/20 Tanggal 30 Maret 2020 Tentang Perubahan Pedoman Penerapan Program APU & PPT
16.	Pedoman dan Kebijakan Manajemen Risiko	No.005/SK/DIR-AUM/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ S.KEP No.14/DIRR-PML/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Penilaian Tingkat Risiko.</li> <li>▪ S.KEP No.16/DIRR-PML/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Tentang Penunjukkan Pihak Penanggung Jawab Manajemen Risiko dan Kepatuhan.</li> <li>▪ S.KEP No.17/DIRR-PML/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Petugas Kelangsungan Bisnis Perusahaan PT PFI Mega Life Insurance</li> <li>▪ S.KEP No.026/DIRR-PML/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko PT. PFI Mega Life Insurance.</li> </ul>

### C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT MEGA FINANCE	PT MEGA AUTO FINANCE	PT MEGA CENTRAL FINANCE
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan /Kebijakan GCG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKD.No.018/BOD/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014</li> <li>▪ SKD.No.25/BOD/V/2020 Tanggal 4 Mei 2020 (Revisi)</li> </ul>	009/ MAF / SI / II/2020 Tanggal 14 Februari 2020	Pedoman Tata Kelola Tanggal 3 Januari 2017

2.	Board Manual Komisaris dan Dekom	Board Manual PT. Mega Finance (Revisi II) Tanggal 1 Oktober 2020	021/ MAF / SI II/2020 Tanggal 21 Februari 2020	006/MCF/DIR/X/ 2018 Tanggal 1 Oktober 2018
3.	Pedoman Kerja Komite Pada Dekom (masing-masing komite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK.No.002/K-AUDIT/I/K- Audit/I/2017 Tanggal 31 Januari 2017 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT. Mega Finance</li> <li>▪ Board Manual PT. Mega Finance (Revisi II) Tanggal 1 Oktober 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Direksi No. SKD-00021 - BRISK - MAF-XII Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pembentukan Komite Audit</li> <li>▪ SK Direksi No. SKD-00023 - BRISK - MAF-XII Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko</li> <li>▪ SK Direksi No. SKD-00024 - BRISK - MAF-XII Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Direksi No. 011-LGL-MCF-III-2021 Tanggal 22 Maret 2021 Tentang Pembentukan Komite Audit</li> <li>▪ SK.Direksi No.SKD-00022-BRISK - MCF-XII 2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko</li> <li>▪ SK.Direksi No.SKD-020-MCF-V- 2021 Tanggal 26 Mei 2021 Tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi</li> </ul>
4.	Panduan Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS Manual)	Board Manual PT. Mega Finance (Revisi II) Tanggal 1 Oktober 2020	N.A	006/MCF/DIR/X/ 2018 Tanggal 1 Oktober 2018
5.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SKD 020/BOD/XIII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 Tentang Buku Komitmen Integritas dan Kode Etik Perusahaan	026/MAF/SI/III/ 2020 Tanggal 2 Maret 2020 Tentang Kebijakan Disiplin & Etika Kerja (Dicioline & Code of Conduct)	Pedoman Disiplin & Etika Kerja Tanggal 1 Mei 2016
6.	Kebijakan Akutansi LJK	PAK -01 sd PAK 0-3 Tanggal 27 Juni 2015 (Pedoman Akutansi dan Keuangan berikut revisinya )	Pedoman Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan Ke OJK Tanggal 3 Januari 2017	Pedoman Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan Ke OJK Tanggal 3 Januari 2017
7.	Kebijakan Remunerasi	SKD No.077/BOD/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018	SKD-00014-MAF-BOD-V-2021 Tanggal 26 Mei 2021	SKD-00020-MCF-BOD-V-2021 Tanggal 26 Mei 2021

8.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKD.058/ BOD/ XI/ 2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Pedoman Kebijakan Kepatuhan (Rev 1)</li> <li>▪ SKD.006/BOD/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 Tentang Ketentuan Larangan Menerima atau Memberi Hadiah/Imbalan</li> </ul>	SK Direksi No.SKD.00022-BRISK-MAF-XII-2021 Tanggal 29 Desember 2021	SK Direksi No.SKD.00025-BRISK-MCF-XII-2021 Tanggal 30 Desember 2021
9.	Kebijakan & Prosedur Kerja Audit	024/BOD/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 Tentang Pedoman Kerja Audit-Revisi 2020	010/MAF/SI/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020	Pedoman Kerja SKAI Tanggal 9 Januari 2017
10.	Audit Charter	021/BOD/IV/2020 Tanggal 6 April 2020	010/MAF/SI/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020	Pedoman Kerja SKAI Tanggal 9 Januari 2017
11.	Compliance Charter (Piagam Kepatuhan)	SKD No.058/BOD/XI/2018 Tanggal 21 November 2018	N.A	
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SKD.055/ BOD /X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Kebijakan Benturan Kepentingan Revisi I	SK.NO.005/MAF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018	SK.NO.005/MCF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018
13.	Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKD.052/BOD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pedoman Strategi Anti Fraud</li> <li>▪ SKD.057/BOD/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Penunjukkan Unit Anti Fraud</li> </ul>	020/MAF/SI/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020	SOP Unit Kerja Anti Fraud Tanggal 24 Juni 2019
14.	Kebijakan Pelindungan Konsumen	SKD.No. 038/BOD/XII/2014 Tanggal 23 Desember 2014 Tentang Kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen	019/MAF/SI/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020	002/MCF/SI/I/18 Tanggal 2 Januari 2018
15.	Kebijakan APU PPT	SKD.No. 060/BOD/XI /2021 Tanggal 25 November 2021 Tentang Pedoman Standar Penerapan Program APUPPT (Revisi 2021)	SKD No.0063-MAF-X-2020 Tanggal 30 Mei 2020	SKD No.0064-MCF-X-2020 Tanggal 1 Oktober 2020

#### D. LJK Terelasi Perusahaan Efek

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SE Direksi No. 005/IC-DIR/ IX /2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Komitmen	SK DIR No.KEP-109/SK-DIR/VII/19 tanggal 30 Juli 2019 tentang	Buku Komitmen Integritas tanggal 24 Oktober 2018

		Integritas	Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Revisi 1)	
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SE No 028/IC-DIR/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Board Manual	SK. KEP-099/SK-DIR/X/18 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Board Manual - Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi(Revisi1)	KEP.007/DIR/COMPL/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Boad Manual
3.	Pedoman Kerja Komite pada Direksi	N.A	SK DIR No KEP-118/SK-DIR/VIII/21 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Komite Investasi & Tim Pengelola Investasi	KEP 010/DIR-MCIV /SK/V/17 tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Investasi & Riset
4.	Panduan Bagi Komite (Comitte Manual)	N. A	SK DIR No KEP-118/SK-DIR/VIII/21 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Komite Investasi & Tim Pengelola Investasi	KEP 010/DIR-MCIV /SK/V/17 tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Investasi & Riset
5.	Panduan Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	N.A	Board Manua Bab.3.11 SK DIR No KEP-099/SK-DIR/ X/18 tanggal 10 Oktober 2018	N.A
6	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE Direksi No. 005/IC-DIR/ IX /2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Komitmen Integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SE DIR No.054/ SE-DIR/ IV/ 13 tanggal 18 April 2013 tentang Perilaku Pegawai/Tenaga Pemasaran</li> <li>▪ SK DIR. No KEP-054/SK-DIR/II/16 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi</li> </ul>	SK No.KEP-039/DIR/Comply/XI/ 18 T tanggal 8 November 2018 tentang Pedoman Penerapan Perilaku Manajer Investasi
7.	Kebijakan Akutansi LJK	SE No.008 /IC-DIR/VIII /2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Kebijakan Akutansi	SK DIR No.KEP-063/SK-DIR/IX /16 tanggal 5 September 2016. tentang Pedoman Akutansi Perusahaan	SK No.KEP-009/DIR-MCIV/ SK/V/17 tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Akutansi & Keuangan
8.	Kebijakan Remunerasi	SE.No.29/IC-DIR/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Pedoman Kebijakan Remunerasi	SK DIR No.KEP.098/SK-DIR/X/18 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Dekom, Direksi, DPS dan Karyawan	SK No.KEP-036/DIF Compl/ SK/XI/1 tanggal 2 Novembe 2018 tentan Kebijakann Remunerasi

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2021

9.	Kebijakan Fungsi Kepatuhan	SE.No.027/DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Compliance Charter	SK.KEP-100/SK-DIR/X/18 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Compliance Charter	SK No.KEP-012/DIR-MCIV/SK /V/17 tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Kepatuhan
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SK DIR KEP 012/IC-DIR/I/SK tanggal 2 Januari 2018 tentang Pedoman Kerja Audit Internal	SK No.KEP-042/SK-DIR /IX/ 15 tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Risk Based Audit	SK No.KEP-014/DIR-MCIV/SK /V/17 tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Internal Audit
11.	Audit Charter	SE.No.008/IC-DIR/I/ 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Internal Audit Charter	SK DIR No.KEP-042 /SK/-DIR/IX/15 tanggal 14 September 2015. tentang Internal Audit Charter	KEP. DIR No.037/DIR-MCINV/SK/IX/15 tanggal 1 September 2015 tentang Internal Audit Charter
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SE.No.026/IC-DIR / X / 2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pedoman Benturan Kepentingan	SK. KEP-097/SK-DIR/X/18 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan	KEP 021/DIR-MCIV/SK/18 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan
13.	Compliance Charter	SE.No.027/DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018	SK.DIR.NO.KEP-100/SK-DIR/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018	KEP 020/DIR-MCIV/SK/18 tanggal 24 Oktober 2018
14.	Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud	SE.No. 005 / IC -DIR / IX /2015 tanggal 14 September 2015	SK No.KEP-005/SK-DIR/VIII/11 tanggal 11 Agustus 2011	KEP 025/DIR-KOM/SK/XI/20 tanggal 4 November 2020
15.	Kebijakan Perlindungan Konsumen	SE.No. 009 / IC - DIR / VIII / 2014 tanggal 24 Agustus 2014 tentang Pelaksanaan Kebijakan Operasional Perlindungan Konsumen	SK No.KEP-016/SK-DIR/II/16 tanggal 24 Februari 2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Konsumen	No. Dokumen : 905/KO/15 tanggal 2 November 2015 tentang Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen
16.	Kebijakan APUPPT	SE.No.007/DIR/V/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	SK No.KEP-113/SK-DIR/III/20 tanggal 20 Maret 2020 tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APUPPT	Kebijakan Perusahaan No.300.2 tanggal 26 Mei 2020 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Lampiran 4. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)

NO	Peraturan POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN		
		PT. BANK MEGA, Tbk.	PT. BANK MEGA SYARIAH	PT. ALLO BANK INDONESIA, Tbk.
1.	Pembentukan Unit Kerja Khusus/ Menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan APU & PPT			
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Surat Keputusan Direksi No. SK.025 / DIRBM /21 tanggal 29 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega	Surat Keputusan Direksi No. SKEP 005 / DIRBMS / 21 tanggal 24 Mei 2021 tentang Organisasi Kantor Pusat & Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah	Surat Keputusan Direksi No. SK.132 A / DIRAB / 21 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi 2021 PT. Allo Bank Indonesia, Tbk.
	b. Unit Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu ) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang sebagai pelaksana	Telah memiliki Unit Kerja Khusus Anti Money Laundering.	Unit kerja khusus terdiri dari 1 orang yang bertindak sebagai desk compliance Head, 1 APUPPT & UKPN Unit Head dan 2 orang APUPPT Analiyst	Unit Kerja Khusus Compliance & AML
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan	Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.	Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.	Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan.
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Comply	Comply	Comply
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Program APU PPT yang disetujui oleh Direksi	SK. Direksi No.042 / DIRBM / 20 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU & PPT)	SE NO. 014/DIRBMS/20 tanggal 28 Februari 2020 tentang Kebijakan Operasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Mega Syariah	SK. Direksi No.130 / DIRAB / 1 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
3.	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK	Comply	Comply	Comply
	b. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK	Comply	Comply	Comply
	c. Menindaklanjuti Permintaan data dan Informasi rekening keuangan terkait dengan CTR dan STR dari PPATK	Comply	Comply	Comply
	d. Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan lainnya.	Comply	Comply	Comply
	e. Melaksanakan pelatihan/Training APU PPT kepada	Bank telah melaksanakan pelatihan / Training APU	Bank telah melaksanakan pelatihan /Training APU PPT kepada pegawai	Bank telah melaksanakan pelatihan/Training APU PPT kepada pegawai

	pegawai minimal 1 kali setahun dan membuat laporan ke OJK	PPT kepada pegawai minimal 1 kali setahun dan membuat laporan ke OJK melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran.	minimal 1 kali setahun dan membuat laporan ke OJK melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran.	minimal 1 kali setahun dan membuat laporan ke OJK melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran.
	f. Melakukan <i>screening</i> dalam rangka penerimaan pegawai baru ( <i>pre-employee-screening</i> dan <i>Know Your Employee</i> (KYE)	Comply	Comply	Comply

NO	Peraturan POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN	
		PT Asuransi Umum Mega	PT PFI Mega Life dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/Menunjuk anggota Direksi/Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan APU & PPT (ada distruktur organisasi, bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama)	Satuan Kerja ERM, Legal & Compliance	Satuan Kerja Compliance & GCG
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Ya Comply	Belum membentuk unit kerja khusus tetapi hanya menunjuk Pejabat penanggung jawab
	b. Unit Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu ) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang sebagai pelaksana	Dibawah Direktur ERM, Legal & Compliance  Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Dibawah Direktur Kepatuhan  Pejabat tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	SK No.020/SK/DIR-UTA/IX/2018 tanggal 20 November 2018 Tentang Pedoman Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme.	SK.KEP/DIRCCR-PML/III/20 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme.
3	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	AUM tidak memiliki produk yang memungkinkan Nasabah bertransaksi secara tunai. Jika kemudian terdapat transaksi CTR, AUM akan melaksanakan pelaporan.	PFI ML tidak memiliki produk yang memungkinkan Nasabah bertransaksi secara tunai. Jika kemudian terdapat transaksi CTR, PFI ML akan melaksanakan pelaporan.
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	AUM akan melaksanakan pelaporan jika terdapat STR	PFI ML akan melaksanakan pelaporan jika terdapat STR
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	Comply	Comply
	d. Melakukan <i>screening</i> dalam rangka penerimaan pegawai baru ( <i>pre-employee-screening</i> ) dan <i>Know Your Employee</i> (KYE)	Comply	Comply

NO	Peraturan POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/Menunjuk anggota Direksi/Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan APU & PPT (ada distruktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)			
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus APU PPT pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus Departemen APU & PPT pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus Departemen APU & PPT pada struktur organisasi
	b. Unit Kerja Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana	Telah memiliki unit khusus dan sesuai ketentuan	Telah memiliki unit khusus dan sesuai ketentuan	Telah memiliki unit khusus dan sesuai ketentuan
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	Sudah memiliki Pedoman sesuai ketentuan POJK. SKD No.060 / BOD / XI /2021 tanggal 25 November 2021	Sudah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) tanggal 12 September 2017	Sudah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) tanggal 12 September 2017
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Ya jika ada transaksi tunai Rp. 500 juta	Disampaikan bila ada	Disampaikan bila ada
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Disampaikan jika ada transaksi mencurigakan	Disampaikan jika ada transaksi mencurigakan	Disampaikan jika ada transaksi mencurigakan
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan

NO	PERATURAN POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan APU & PPT (ada distruktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)			
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus APU PPT pada struktur organisasi	Dirangkap oleh koordinator fungsi Manajemen Risiko , Kepatuhan dan Audit Internal	Telah memiliki Unit APU PPT
	b. Unit Kerja Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana	Telah memiliki unit khusus dan sudah dilaksanakan	Penerapan AP PPT ditangani oleh pejabat, yakni dengan kewenangan mengusulkan nama pegawai untuk membantu penerapan program APU PPT pada inisiatif-unit kerja terkait.	Telah memiliki unit khusus dan sudah dilaksanakan
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direksi	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah yang disetujui oleh Dewan Komisaris	Kebijakan No. 201.1 SOP Penerapan Program APUPPT	SK DIR No.KEP 113 SK-DIR / III / 20) Tentang Kebijakan Serta Prosedur Penerapan Program APU PPT	Kebijakan Perusahaan No.300.2 tanggal 26 Mei 2020
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Disampaikan bila ada yang harus dilaporkan	Tidak ada transaksi tunai (Dana pembelian unit Reksadana dilakukan melalui Bank Kustodian dan tidak melalui manajer investasi	Tidak ada transaksi tunai
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Disampaikan bila ada yang harus dilaporkan	Dilaksanakan jika ada Transaksi Keuangan Mencurigakan.	Dilaksanakan jika ada Transaksi Keuangan Mencurigakan.
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan terkait KYC minimal 1 kali dan membuat pelaporan ke OJK	Telah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan No. 201.1 SOP Penerapan Program APU PPT.	Pelatihan telah dilakukan secara periodik dan telah dilaporkan	Pelatihan telah dilakukan secara periodik dan telah dilaporkan
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Dilaksanakan pada saat recruitment	Dilaksanakan pada saat recruitment	Dilaksanakan pada saat recruitment

Lampiran 5. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Perlindungan Konsumen

1. Perbankan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA PERBANKAN		
		Bank Mega	Bank Mega Syariah	Allo Bank Indonesia
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah : Customer Experience & Customer Care	Unit Kerja Khusus di Kantor Pusat (Customer Care Unit) serta penunjukan CS dan OM sebagai PIC di Kantor Cabang untuk penyelesaian pengaduan nasabah dengan Kebijakan Operasional dan SOP No. 08.04 Revisi 1 dan SOP No. 08.04.0.00 mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan	Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah : Help Desk & Call Center Kantor Pusat
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah kepada seluruh pegawai yang terkait penanganan pengaduan nasabah secara berkala	E-Learning handling complaint tahun 2021 dilakukan dalam 5 Batch yaitu pada Bulan Juli, Agustus dan Desember. Yang diikuti oleh 6.710 peserta yang terdiri dari pegawai Marketing, Operation dan pegawai KPNO.	Telah dilaksanakan : 1. <i>Refreshment virtual training</i> pengaduan & perlindungan nasabah dan APU PPT (CS, Teller, BO) tanggal 9 April 2021 ( <i>zoom meeting</i> ) 2. <i>Refreshment virtual training</i> pengaduan & perlindungan nasabah dan APU PPT (OM) tanggal 16 April 2021 ( <i>zoom meeting</i> ) 3. <i>Refreshment training</i> pengaduan & perlindungan nasabah (CS, Teller, BO) tanggal 4 November 2021 di KC Yogyakarta 4. <i>Refreshment training</i> pengaduan & perlindungan nasabah (CS, Teller, BO) tanggal 4 November 2021 di KC Solo	Belum dilakukan sosialisasi lagi sejak Pandemic Covid-19.
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Bank Mega secara aktif menyelenggarakan program-program edukasi nasabah, Literasi Keuangan "Ayo ke Bank" dan Inklusi keuangan.  Pada tahun 2021, sebagai rangkaian perayaan dari HUT ke 52, Bank Mega melaksanakan kegiatan Edukasi Perbankan "Ayo ke Bank" kepada anak-anak yatim piatu pondok pesantren Al - Bayyan Bekasi Jawa Barat. Diharapkan kegiatan edukasi ini	Telah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Penyelenggaraan Literasi Keuangan - Revisi 01 (satu) oleh Corporate Secretary Division	Belum dilakukan sosialisasi lagi sejak Pandemic Covid-19.

*f p l*  
*AR*

		dapat mendorong minat anak-anak untuk mulai merencanakan masa depan mereka dengan mulai menabung di Bank.		
4.	Review Formulir / Aplikasi / Buku Tabungan/ Collateral Promotion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Form persetujuan pemegang reksadana</li> <li>• Fitur transfer bi-fast pd aplikasi msmile</li> <li>• Fitur point pada aplikasi msmile</li> <li>• Aplikasi eform request data</li> <li>• Aplikasi webform 2.0 megafirst</li> <li>• Aplikasi MEMo</li> <li>• Promosi produk/program melalu aplikasi wa</li> <li>• Pembukaan rek simpanan dan/atau KK melalui aplikasi m-auto</li> <li>• Syarat dan ketentuan pembukaan rekening dan perubahan instruksi deposito melalui aplikasi m-smile</li> <li>• Pembukaan rek nasabah perorangan melalui aplikasi m-branch</li> <li>• Pembukaan rek tab dan KK melalui aplikasi m-auto</li> <li>• Formulir Ultimate Beneficial Owner (UBO)</li> </ul>	<p>Form dan Aplikasi yang telah disesuaikan dengan ketentuan OJK pada tahun 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Data Nasabah &amp; Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan - Bank Mega Syariah</li> <li>2. Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan - Bank Mega Syariah</li> <li>3. Lembar Syarat &amp; Ketentuan Umum</li> <li>4. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)</li> </ol> <p>Form dan aplikasi yang sedang dalam proses review :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi Pembukaan Safe Deposit Box</li> <li>2. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam Negeri</li> <li>3. Slip Penarikan</li> <li>4. Slip Setoran</li> </ol>	<p>Berikut Form yang telah disesuaikan dan perubahan Logo Allo Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Form FDN &amp; Pembukaan Rekening Non Perorangan</li> <li>• Form Perubahan Data Nasabah</li> <li>• Form Penutupan Rekening</li> <li>• Form Spesimen</li> <li>• Form L.O.I</li> <li>• Surat Kuasa Finansial</li> <li>• Surat Kuasa Non Finansial</li> <li>• Slip Setoran</li> <li>• Slip Penarikan</li> <li>• Slip Transfer dan Pindahbukuan</li> <li>• Buku Cek/BG</li> <li>• Bilyett Deposito</li> <li>• Bilyett Giro</li> </ul>
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SE.149/DIRBM-CPPD/15 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Kebijakan Edukasi Perbankan	SE.115/DIRBMS/18 tanggal 4 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Edukasi & Literasi Keuangan	SK No. 009/DIRAB/21 tanggal 17 Juni 2021 tentang Perlidungan Konsumen
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	SE.129/DIRBM-PMOC/20 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penanganan Dan Pelaporan Pengaduan Nasabah	SE.052/DIRBSM/16 tanggal 20 Juli 2016 tentang Kebijakan Pengaduan Nasabah dan Mediasi	SE No. 022/DIRAB-SE/21 tanggal 01 Juli 2021 tentang Penanganan dan Pelaporan Pengaduan Nasabah  SK No. 009/DIRAB/21 tanggal 17 Juni 2021 tentang Perlidungan Konsumen
	c. Penyampaian Informasi Dalam	SE.065/DIRBM-PRMG/19 tanggal 15 April 2019	SE.094/DIRBMS/19 tanggal 30 Desember 2019 tentang	SK No. 009/DIRAB/21 tanggal 17 Juni 2021

	Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	tentang Perlindungan Konsumen Dalam Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan atau Layanan Jasa Perbankan	Kebijakan Operasi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	tentang Perlindungan Konsumen
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SE.157/DIRBM-CPPD/15 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku	SE.093/DIRBMS/19 tanggal 27 Desember 2019 tentang Kebijakan Operasi Penyusunan Perjanjian Baku	SK No. 009/DIRAB/21 tanggal 17 Juni 2021 tentang Perlindungan Konsumen
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SE.159/DIRBM-CPPD/15 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Kerahasiaan Dan Keamanan Data Atau Informasi Pribadi Konsumen.	SE.094/DIRBMS/19 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kebijakan Operasi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	SK No. 008/DIRAB/21 tanggal 10 Juni 2021 tentang Keamanan Informasi  SK No. 009/DIRAB/21 tanggal 17 Juni 2021 tentang Perlindungan Konsumen
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SE.230/DIRBM-PMOC/21 tanggal 10 Desember 2021 tentang Self Assessment Edukasi Dan Perlindungan Konsumen	SE.052/DIRBSM/16 tanggal 20 Juli 2016 tentang Kebijakan Pengaduan Nasabah dan Mediasi	SK No. 009/DIRAB/21 tanggal 17 Juni 2021 tentang Perlindungan Konsumen

## 2. Perusahaan Asuransi

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI	
		PT Asuransi Umum Mega	PT PFI Mega Life dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	SK Nomor 007/SK/DIR-AUM/III/2021 tentang pembentukan Service Committee Pengaduan Pelanggan PT. Asuransi Umum Mega	Telah dibentuk Unit Kerja Khusus (UKK) SK.No.014/DIR-MI/III/2019
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Sosialisasi Pengaduan Pelanggan melalui layanan call center Halo MIA tanggal 19 Februari 2021	- Penyampaian kepada customer via Bank Mega (Bancassurance) - Sosialisasi pertama via email tanggal 11-Juni-2020 - Selanjutnya SOP dilampirkan dan di blast melalui email; setiap bulannya bersamaan dengan report complaint
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	1. Tercantum dalam Ketentuan Umum Polis 2. Website Perusahaan khususnya mengenai Produk Asuransi yang dipasarkan	Tercantum pada Ketentuan Umum Polis dan Website PML
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Review Polis, SPPA, dan SPAK	Review Polis dan SPAJ
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal		
	a. Kebijakan Pelaksanaan	SK Nomor 043/MI/SK/DIR-	Terdapat dalam Pedoman

	Edukasi Dan Literasi Keuangan	AUM/XI/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Program Ketentuan Literasi dan Inklusi Keuangan	Perlindungan Konsumen No.005B/DIR-MI/II/16
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Dilaksanakan berdasarkan IM No.117/MI/IM/DIR-HRDGA/VIII/16 Tanggal 22 Juni 2016 (kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen)	- Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen Versi 2.0 pada SK No.005B/DIR-MI/II/16 - SOP Pedoman Penanganan Pengaduan Konsumen ver 2.0 efektif per tanggal 15-Juni-2020
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/ atau Layanan Jasa Keuangan	Sudah disosialisasikan oleh unit terkait dan adanya pembaharuan SOP per Mei 2016	- Spek produk & Ketentuan Umum Pasal 30 - Penjelasan produk pada ringkasan informasi
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SK No.021/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 20 Juni 2016	Review SPAJ dan Polis sesuai dengan ketentuan internal perusahaan yang berlaku
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen	SK No.022/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 20 Juni 2016	Penerbitan kebijakan kerahasiaan data SK No. KEP.010/DIRR-PML/VI/20
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	IM No.118/MI/IM/DIR-HRDGA/VII /16 Tanggal 22 Juli 2016	Pada SOP Layanan panggilan Keluar Ver 2.0 (31-Oct-2019) dan Layanan Melalui Email Ver 2.0 (5-Mei-2020) disebutkan akan dilakukan review secara berkala.

### 3. Perusahaan Pembiayaan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Dibentuk Unit Pengaduan Nasabah di bawah Divisi Nasional Service	Tidak ada unit khusus, penanggung jawab di cabang adalah Kepala Cabang , yang akan berkoordinasi dengan PIC Kantor Pusat (d disesuaikan dengan subyek keluhan nasabah)	Tidak ada unit khusus, penanggung jawab di cabang adalah Kepala Cabang , yang akan berkoordinasi dengan PIC Kantor Pusat Pedoman (d disesuaikan dengan subyek keluhan nasabah)
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Dilakukan coaching dan sosialisasi ketentuan kepada petugas	Sosialisasi dilakukan ke karyawan melalui training secara regular (Pedoman Perlindungan Konsumen No.019/MAF/SI/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020)	Sosialisasi dilakukan ke karyawan melalui training secara regular (Pedoman Perlindungan Konsumen No.002 /MCF/DIR/II/2018 Tanggal 2 Januari 2018)
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Dilakukan Unit Literasi dan Inklusi berdasarkan SKD No.016/DIR/III/2020 tanggal 18 Maret 2020	1. Konsumen dan masyarakat dapat berkomunikasi langsung melalui SMS ataupun menghubungi langsung kantor cabang. 2. Dilakukan dengan mengikuti acara Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan/OJK atau	1. Konsumen dan masyarakat dapat berkomunikasi langsung melalui SMS ataupun menghubungi langsung kantor cabang. 2. Dilakukan dengan mengikuti acara Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan/OJK atau

			dilakukan secara mandiri. Baik rencana edukasi & realisasi edukasi dan dilaporkan secara periodik kepada OJK.	dilakukan secara mandiri. Baik rencana edukasi & realisasi edukasi dan dilaporkan secara periodik kepada OJK.
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Dilakukan secara reguler sesuai dengan kebutuhan	Dilakukan secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan maupun regulasi baru	Dilakukan secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan maupun regulasi baru
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SKD.043/BOD/XII /2014 tanggal 30 Desember 2014	Pedoman Perlindungan Konsumen No.019/MAF/SI/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020	Pedoman Perlindungan Konsumen No.002 /MCF/DIR/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	SKD.No.038/BOD/XII /2014 tanggal 23 Desember 2014		
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	SKD.044/BOD/XII /2014 tanggal 30 Desember 2014		
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SKD.045/BOD/XII /2014 tanggal 30 Desember 2014		
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SKD.046/BOD/XII /2014 tanggal 30 Desember 2014		
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SKD.047/BOD/XII /2014 tanggal 30 Desember 2014 (Sudah dilaporkan melalui Aplikasi OJK SIPEDULI)		

#### 4. Perusahaan Efek

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Melalui CS Cabang, difollow up oleh Kepatuhan bila ada	Fungsi Pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah dilaksanakan dalam satu kesatuan fungsi dan ditetapkan dalam struktur organisasi perusahaan (SK DIR No.KEP-110/SK-DIR/VII/19 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan)	Unit Kerja Pemasaran & Pengaduan Nasabah

2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SE.009/IC-DIR/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Kebijakan dan prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen</li> <li>■ Melalui training Pasar Modal, juga disampaikan Sosialisasi Pelindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan &amp; Prosedur Perlindungan Konsumen</li> <li>■ Publikasi atau penyampaian informasi kepada konsumen dan masyarakat mengenai tata cara penyampaian dan penanganan pengaduan serta akses layanan penanganan pengaduan tersedia dalam web site perusahaan</li> </ul>	Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan (903/KO/15)
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Melakukan training Pasar Modal kepada masyarakat, kampus dan komunitas serta kerjasama dengan program BEI dan telah diinput ke OJK via Sistem SIPEDULI	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi konsumen dilakukan oleh tim pemasaran atau melalui publikasi leaflet maupun website dan telah diinput ke OJK via Sistem SIPEDULI</li> </ul>	Telah diinput melalui sistem SIPEDULI
4.	Review Formulir/ Collateral Promotion	N.A	Perjanjian Baku (FPR) dan formulir aplikasi telah disesuaikan berdasarkan (SE.OJKNo.013/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Perjanjian Baku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preview Formulir Pembukaan Rekening (FPR),</li> <li>■ Profil Pemodal,</li> <li>■ Form Pembelian dan Penjualan Reksadana sudah dilakukan pada Nov 2017,</li> <li>■ Review Prospektus dilakukan setiap awal tahun dengan menerbitkan prospektus pembaharuan,</li> <li>■ Review Brosur dilakukan setiap ada yang baru.</li> </ul>
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SK DIR No.KEP-016 / SK-DIR/II/14 Tentang Kebijakan &amp; Prosedur Perlindungan Konsumen</li> <li>■ SE DIR No.83/SE-DIR/IX/15 tentang Rencana Edukasi &amp; Pelaksanaan Edukasi</li> </ul>	Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan (903/KO/15)

	<p>b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan</p>	<p>SE.009/IC-DIR/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SK DIR No. KEP-016 /SK-DIR/II/14 Tentang Kebijakan &amp; Prosedur Perlindungan Konsumen</li> <li>■ SOP No.XI. tanggal 24 Maret 2014 (R2) tentang Pelayanan &amp; Penyelesaian Pengaduan Konsumen (<i>Internal Dispute Resolution</i>)</li> <li>■ SOP No.XXXVIII tanggal 24 Maret 2014 (RO) tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen (<i>Eksternal Dispute Resolution</i>)</li> </ul>	<p>Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (907/KO/15)</p>
	<p>c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan</p>	<p>SE.009/IC-DIR/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan &amp; Prosedur Perlindungan Konsumen</li> <li>■ Penerbitan Reksa Dana telah dilengkapi dengan Prospektus , dokumen keterbukaan informasi, Ringkasan Informasi Produk dan/ keterbukaan produk</li> </ul>	<p>Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (904/KO/15)</p>
	<p>d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku</p>	<p>SE.009/IC-DIR/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan &amp; Prosedur Perlindungan Konsumen</li> <li>■ Persetujuan Direksi melalui IM No.001/CPL/III/15 Tanggal 16 Maret 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Format Formulir Pembukaan Rekening</li> </ul>	<p>Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku (901/KO/15)</p>
	<p>e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen</p>	<p>SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan &amp; Prosedur Perlindungan Konsumen</li> <li>■ SE DIR No.084 / SE-DIR/IX/15 tentang Kerahasiaan Data dan/Informasi Pribadi Pemodal</li> </ul>	<p>Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (902/KO/15)</p>

	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SE.009/IC-DIR/VIII/ 2014 Tanggal 28 Agustus 2014	■ Surat MAM No.165 /DIR-MAM/IX/21, tanggal 24 September 2021 Peihal Laporan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Edukasi dan Perlindungan Konsumen	Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen (905/KO/15 dan 906/KO/15)
--	---	--	--	---

Lampiran 6. Data Perjanjian Kerjasama (PKS) Transaksi Intra Group KK Mega Corpora

No	LJK	Counterparty	Jenis PKS	No. Kontrak (PKS)	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
1	BMS	BM	Addendum ke-1 PKS Layanan Jasa Konsultasi & Asistensisi	005/BMS/PKS-ADD/II/2019	28-Feb-19	28-Feb-22
			Addendum ke-1 PKS Layanan MEGANET	001/BMS/PKS-ADD/II/2019	22-Jan-19	22-Jan-24
			Sinergi Perbankan	101/BMS/PKS/XI/2020	20-Nov-20	20-Nov-23
			Sewa menyewa It.G	010/PRFS-PSM/2021	25-Mar-21	24-Mar-22
			Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt. 8	Addendum II	27-Dec-17	26-Dec-22
			Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 2	025/PRFS/2020	17-Dec-20	17-Dec-25
			Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai Dasar dan 2	010/PRFS/2018	20-Jun-18	19-Jun-23
			Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 1	026/PRFS/2020	17-Dec-20	17-Dec-25
			Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Surabaya Darmo Lt 1 & 2	Addendum II	2-Mei-17	1-Mei-22
			Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Ground Floor	024/PRFS/2020	17-Dec-20	17-Dec-24
			Addendum ke-1 PKS Pendaftaran Tabungan Haji iB Mega Syariah	007/BMS/PKS-ADD/II/2021	22-Sep-20	22-Sep-22
			Perjanjian Kerjasama Penerbitan Mega Corporate Card	017.1/BMS/PKS/III/2021	3-Mar-21	3-Mar-24
			Addendum PKS Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	508/ADDPKS-JF/BMS/VI/2021	21-Jul-21	21-Jul-22
			Addendum ke-7 Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Akad Musyarakah	1099/ADD7-PRKS/BMS/XII/2021	17-Dec-21	17-Dec-22
2	ALL O	PML	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	828/ADDPKS-JF/BMS/XI/2020	22-Sep-20	21-Sep-22
			Addendum ke-6 Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Akad Musyarakah	1100/ADD6-PRKS/BMS/XII/2021	17-Dec-21	17-Dec-22
3	AUM	BM	Perjanjian Kerjasama Referensi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro	030/BMS/PKS/III/2021	30-Mar-21	30-Mar-22
			Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama Referensi Produk Syariah Asuransi Mega Amanah Link	046/BMS/PKS-ADD/XII/2021	5-Dec-21	4-Dec-24
			Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) " Berkah iB"	015/BMS/PKS-ADD/V/2021	17-Apr-21	16-Apr-24
			Addendum ke-2 PKS Layanan Transaksi Pembayaran Gaji	051/PML/Add.PKS/LGL/XI/2021	25-Okt-21	25-Okt-26
			Sewa Menyewa Lt. 5 & 6	029/PRFS/2021	1-Nov-21	31-Okt-26
			Penyediaan Jasa Teknologi Informasi Data Center dan atau Data Recovery Center	022/PRFS/2021	23-Sep-21	22-Sep-24
			Pengadaan Jasa Asuransi Bagi Agunan Kredit	001/PKS/AUM-MKT_BG-BHI/V/2021	6-Mei-21	6-Mei-23
			Addendum ke-4 PKS Penjualan Produk Asuransi Kesehatan "Mega Kesehatan"	019/DIRBM-RPDB/PKS/2019	22-Okt-20	24-Dec-23
			Addendum ke-4 PKS Penjualan Produk Mega Kendaraan	018/DIRBM-RPDB/PKS/2019	22-Okt-20	5-Jul-23
			Addendum ke-4 PKS Penjualan Produk Mega Rumah	020/DIRBM-RPDB/PKS/2019	22-Okt-20	5-Jul-23
3	AUM	BM	Addendum ke-5 PKS Penjualan Produk Mega Medical Care	010/DIRBM-RPMG/ADD/2020	15-Sep-20	31-Dec-22
			Addendum ke-3 PKS Penjualan Produk Mega Medical Plus	033/DIRBM-RPMG/PKS/ADD/21	1-Jan-22	1-Jan-25
			Addendum ke-5 PKS Penjualan Produk Mega Proteksi Diri	024/ADD.V/AUM.TM-BM/IX/2020	15-Sep-20	31-Dec-22

68  
A.A.A

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2021

No	LJK	Counterparty	Jenis PKS	No. Kontrak (PKS)	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
			Addendum ke-3 PKS Penjualan Produk Mega Protection Plus	034/DIRBM-RPMG/PKS/ADD/21	1-Jan-22	1-Jan-25
			Global Master Repurchase Agreement (GMRA)	074/INV-GM/2021	4-Mar-21	-
			Sewa menyewa Lt.18	011/PRFS-PSM/2021	25-Mar-21	24-Mar-22
			Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Lampung Lt. 3	010/PRFM/2017	1-Jun-17	31-Mei-22
			Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	015/PRFS-PSM/2021	15-Jan-21	14-Mar-26
			Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Jambi Wiltop Lt 3	012/PRFS/2020	10-Jun-20	9-Jun-25
			Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	009/PRFS/2018	20-Jun-18	19-Jun-23
			Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	018/PRFS-PSM/2021	1-Apr-21	31-Mar-24
			Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Malang Dinoyo Lt 3	Addendum I	17-Des-17	16-Des-22
			Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	014/PRFS-PSM/2021	3-Mar-21	2-Des-25
			Sewa Menyewa KC Palu, Lantai 2	033/PRFS/2021	4-Nov-21	3-Nov-26
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Manado Calaca Lt. 3	019/PRFS-PSM/2021	9-Mei-21	8-Mei-26
			Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	013/PRFS-PSM/2021	1-Mar-21	31-Mar-24
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Samarinda Ahmad Yani	013/PRFM/2017	1-Apr-17	31-Mar-22
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Pontianak Siantan	017/PRFS-PSM/2021	1-Apr-21	31-Mei-22
			Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Palembang A. Rivai	012/PRFM/2017	1-Jul-17	30-Jun-22
			Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 2	074/PKS/AUM.MKT.LS-MF/VII/2020	1-Jul-20	1-Jul-22
		MF	Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor (Prinsip Syariah)	075/PKS/AUM.MKT.LS-MF/VII/2020	1-Jul-20	1-Jul-22
			Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4	076/PKS/AUM.MKT.LS-MF/VIII/2020	1-Jul-20	1-Jul-22
		MAF	Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor	008/PKS/AUM.MKT.LS-MAF/II/2020	1-Mei-20	1-Mei-22
			Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor	034/PKS/AUM.MKT.LS-MCF/IV/2020	1-Mei-20	1-Mei-22
		MCF	Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor (Prinsip Syariah)	187/PKS/AUM.LS-MCF/XI/2020	1-Sep-20	1-Sep-22
			Addendum II Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Bagi Pemegang Kartu Kredit "Mega Hospital Investa"	022/MJ/Add.II.Perj.Umum/Lg/XII/2016	2-Jan-17	1-Jan-22
			Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Individu "Mega Proteksi Prima"	002/MJ-PLIC/Perj.Umum/Lg/I/2018	31-Jan-18	31-Jan-33
			Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi "Mega Protection Care"	005/PML/Perj.Umum/II/2019	17-Jan-19	16-Jan-24
		BM	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi "Mega Ultima Shield"	004/PML/Perj.Umum/II/2019	17-Jan-19	16-Jan-24
4	PML		Perjanjian Pendebetan Rekening Kartu Kredit Asuransi "Recurring"	002/AJMI/Perj.Umum/Lg/I/2014	2-Jan-14	-

19A

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2021

No	LJK	Counterparty	Jenis PKS	No. Kontrak (PKS)	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
			Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk Asuransi	003/PML/PKS/I/2019	17-Jan-19	16-Jan-32
			Perjanjian Tambahan terhadap Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk Asuransi "Mega Credit Shield Maksima"	010/PMLI/Add.PKS/LGL/V/2019	29-Mei-19	16-Jan-32
			Addendum Pertama terhadap Perjanjian Distribusi Produk Asuransi	026/PMLI/Add.PKS/LGL/V/2021	07-Aug-20	06-Aug-24
			Perjanjian Tambahan Asuransi Mega Warisan	025/PMLI/PKS/LGL/V/2021	05-Jul-21	04-Jul-23
			Perjanjian Tambahan Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk Asuransi "Mega Comiforta"	024/PMLI/PKS/LGL/VII/2020	7-Aug-20	6-Aug-22
			Perjanjian Kerjasama Referensi Produk Asuransi Tidak Dalam Rangka Produk Bank	036/PMLI/PKS/LGL/V/2020	1-Jul-20	30-Jun-22
			Addendum IV Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Individu Unit Link "Mega Prima Link"	004/PMLI/ADD.PKS/LGL/I/2021	14-Jan-21	02-Sep-23
			Perjanjian Tambahan terhadap Perjanjian Kerjasama Referensi Produk Asuransi Tidak Dalam Rangka Produk Bank "Mega Investa Link"	037/PMLI/PKS/LGL/V/2020	1-Jul-20	30-Jun-22
			Perjanjian Tambahan terhadap Perjanjian Kerjasama Referensi Produk Asuransi Tidak Dalam Rangka Produk Bank "Mega Saving Protection"	065/PMLI/PKS/LGL/VII/2020	30-Jul-20	29-Jul-22
			Perjanjian Kerjasama Referensi Produk Asuransi Tidak Dalam Rangka Produk Bank "Mega Signature Link"	23/PMLI/PKS/LGL/V/2021	18-Jun-21	17-Jun-23
			Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Referensi Produk Asuransi Tidak Dalam Rangka Produk Bank	22/PMLI/PKS/LGL/V/2021	01-Jul-20	30-Jun-24
			Global Master Repurchase Agreement Indonesia (GMRA Indonesia)	042/TSGM/2021	24-Mei-21	-
		MCF	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi		4-Sep-18	4-Sep-22
		MF	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi		25-Mar-19	25-Mar-22
		MAF	Addendum Penambahan Produk Asuransi Mega Solusi Proteksi	043/PMLI/ADD.PKS/V/2020	15-Mei-20	24-Mar-22
			Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi	033/PMLI/PKS/LGL/V/2020	20-Mar-20	20-Mar-23
4	MAF	BM	Perubahan ke-18 Perjanjian Kredit	036/ADD-PK/LCCL/21	07-Jul-21	07-Jul-22
			Perubahan ke-29 Perjanjian Pembiayaan Bersama Mega Oto Joint Financing	071/ADD-MOJF/LCCL/21	6-Dec-21	6-Dec-22
5	MCF	BM	Perubahan ke-28 Perjanjian Pembiayaan Bersama Mega Oto Joint Financing	060/ADD-MOJF/LCCL/21	29-Sep-21	07-Jul-22
			Perubahan ke-18 Perjanjian Kredit	035/ADD-PK/LCCL/21	07-Jul-21	07-Jul-22
			Sewa menyewa Lt.2	008/PRFS-PSM/2021	25-Mar-21	24-Mar-22
			Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	011/PRFS/2018	25-Aug-18	24-Aug-23
6	MCS	BM	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	008/PRFS/2019	1-Apr-19	31-Mar-24
			Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	024/PRFS-PFM/2021	25-Aug-21	24-Aug-26
			Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	018/PRFS/2020	1-Aug-20	31-Mar-24

70  
MFR

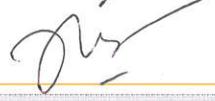
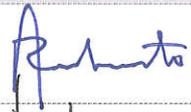
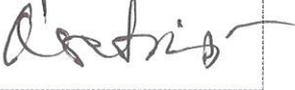
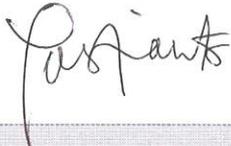
LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2021

No	LJK	Counterparty	Jenis PKS	No. Kontrak (PKS)	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
		MAM	APERD	303/DIR-MCI/IX/2015	1-Okt-21	1-Okt-24
		MCIV	APERD	259/DIR-MCI/VIII/2015	24-Agu-21	24-Agu-24
			Perjanjian Sewa Menyewa Ruang di Objek Sewa MBM Tendeau	163/HRGSD-DIR/IV/2021/PNJ	1-Mar-21	28-Feb-26
7	MAM	BM	APERD	003/APERD-MAM/V/2021	26-Jan-21	26-Jan-24
			Sewa menyewa It.2	025/PRFS-PSM/2021	1-Okt-21	30-Sept-26



74  
A/A

## Lembar Persetujuan

Dibuat oleh:		Tanda Tangan
1	<u>Sri Sugiarti</u> GCG & Governance Integration Specialist	
2	<u>Nova Meilina</u> Integrated Risk Management Head	
3	<u>Aniceta Putri Ariyanti</u> Audit Planning, Quality Assurance & Integration Head	
Diperiksa oleh:		
1	<u>Omar Soeharto</u> Compliance & GCG Head	
2	<u>Rangga Bayu Pamungkas</u> Market, Liquidity & Integrated Risk Management Head	
3	<u>A.Ary Satrio</u> Internal Audit Head	
Disetujui oleh Direksi :		
1	<u>Kostaman Thayib</u> Direktur Utama PT Bank Mega Tbk	
2	<u>Yuni Lastianto</u> Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Mega Tbk	
Disetujui oleh Komisaris :		
1	<u>Achjadi Ranuwisastra</u> Komisaris Independen - Ketua Komite TKT PT Bank Mega Tbk	
Disetujui oleh Mega Corpora :		
1	<u>Ali Gunawan</u> Direktur Mega Corpora	